

**PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI PEMBER-
ANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DENGAN *INDEPENDENT
COMMISSION AGAINST CORRUPTION* (HONGKONG) DA-
LAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PI-
DANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Mem-
peroleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ABDUL MALIK MUFTY

NPM : 5117500070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (INDONESIA) DENGAN *INDEPENDENT COMMISSION
AGAINST CORRUPTION* (HONGKONG) DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

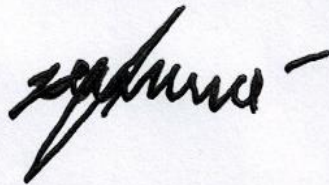
Abdul Malik Mufty

NPM 5117500070

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

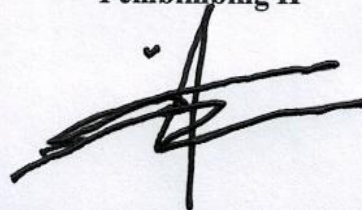
Tegal, 21 Juli 2021

Pembimbing I

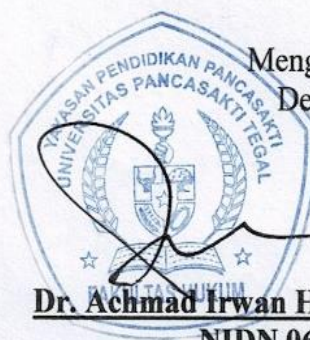


Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN 0606066001

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702



Mengetahui
Dekan,

Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (INDONESIA) DENGAN *INDEPENDENT COMMISSION
AGAINST CORRUPTION* (HONGKONG) DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Abdul Malik Mufty
NPM 5117500070**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 21 Juli 2021

Penguji I

Dr. Hamidah Abdurrahman, S.H., M.Hum.
NIDN 0022105601

Penguji II

Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

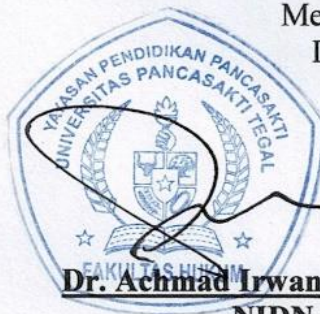
Pembimbing I

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN 0606066001

Pembimbing II

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702

Mengetahui
Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Malik Mufty
NPM : 5117500070
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DENGAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONG KONG) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang menyatakan,



(Abdul Malik Mufty)

Abstrak

Abdul Malik Mufty. PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DENGAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONG KONG) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Skripsi. Program Strata 1, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Sejak KPK dibentuk pada tahun 2003 KPK telah memberikan banyak kontribusi dengan mengungkap banyak kasus korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara, namun KPK tetap di golongkan sebagai badan anti korupsi baru jika dibandingkan dengan ICAC HongKong. ICAC berdiri sejak tahun 1974 dan ICAC menjadi *role model* sebagai badan anti korupsi terbaik di dunia. Perbedaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong terletak pada pelaksanaannya. Institusi badan anti korupsi KPK tidak bisa memaksimalkan kemampuannya untuk mengimplementasikan strategi anti korupsi seperti ICAC sebagai *role model*.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisa strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* HongKong. (2) Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong. (3) Untuk menganalisa pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan komparatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen atau studi pustaka dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan alur berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pencegahan dan pemberantasan korupsi antara KPK dan ICAC menggunakan model strategi yang sama dalam mengatasi korupsi, sedangkan perbedaan terletak pada pelaksanaannya dimana pencegahan KPK dengan pendekatan pendidikan sedangkan ICAC menggunakan pendekatan hukum. Pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didasari oleh tinjauan implementasi UNCAC.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Korupsi, KPK dan ICAC.

Abstract

Abdul Malik Mufty. *COMPARISON OF THE STRATEGY BETWEEN THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (INDONESIA) AND THE INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONG KONG) IN CORRUPTION PREVENTION AND ERADICATION*. Strata 1 Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal, 2021.

Since the kpk was formed in 2003, the kpk has made many contributions by uncovering many corruption cases that have caused losses to the state, but the kpk is still classified as a new anti-corruption agency when compared to the Hong Kong ICAC. ICAC was founded in 1974 and ICAC has become a role model as the best anti-corruption agency in the world. The difference between the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) and the Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong lies in its implementation. The KPK's anti-corruption agency cannot maximize its ability to implement anti-corruption strategies such as ICAC as a role model.

This study aims: (1) To analyze the strategy of preventing and eradicating corruption carried out by the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) and the Independent Commission Against Corruption HongKong (ICAC). (2) To analyze the similarities and differences in the strategies for preventing and eradicating corruption between the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) and the Independent Commission Against Corruption HongKong (ICAC). (3) To analyze reforms in the context of eradicating corruption in Indonesia.

This type of research is research normative, the approach used is a comparative approach, the data collection technique is through document studies or literature studies and analyzed by qualitative methods with deductive thinking lines.

The results of this study show that the prevention and eradication of corruption between the KPK and ICAC uses the same strategy model in overcoming corruption, while the difference lies in the implementation where the prevention of the KPK uses an educational approach while ICAC uses a legal approach. Reforms in the context of eradicating corruption in Indonesia have been carried out with the ratification of Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission based on a review of UNCAC implementation.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Comparative Law, Corruption, KPK and ICAC.

MOTTO

- Kekuatan menimbulkan sedikit korupsi, tetapi kelemahan menimbulkan banyak korupsi. (Erick Hoffer)
- Sebuah pemerintahan yang hanya melindungi kepentingan bisnis, tak lebih dari sekedar cangkang, segera runtuh oleh korupsi itu sendiri dan pembusukan. (Amos Bronson Alcott)
- *The duty of youth is to challenge corruption.* (Kurt Cobain)
- Jangan gunakan cara yang berdosa untuk melakukan kebaikan. Jangan korupsi untuk bersedekah. (Quraish Shihab)
- Semua orang harus bisa bergerak, ikut menyebarkan semangat anti korupsi dan toleransi lewat aksi. (Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas berkat Rahmat-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan dan mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan penulis.
2. Bapa dan mama yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah berhenti untuk kesuksesan penulis, ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan kalian sebagai orang tua saya, karena tanpa kalian penulis bukan apa-apa.
3. Bapak Dwi dan Ibu Sri Hidayati yang selalu memberikan motivasi dan doa tiada henti agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Adik-adik penulis Paramitha Nanda Shofie dan Nafeeza Syua Faihansa yang selalu membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Kakak penulis Sri Rahayu, Dynar yang selalu mendoakan saya dalam penulisan skripsi ini dan terima kasih telah memberikan keponakan-keponakan yang lucu Abel dan rafardan yang selalu menghibur dikala saya mulai jenuh dalam penulisan skripsi ini.
6. Untuk seluruh sahabat penulis terutama Indra Septi Pratama, R, Riski Aska Nafsian, Alvin Andriansyah terima kasih yang selalu bersedia menemani penulis mengerjakan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman KKN penulis yang sudah seperti saudara, terima kasih karena kalian menjadi pelengkap hidup penulis, kepada Afip, Faliq, Rika, Ika, Sarifah, Ida meskipun hanya bersama saat KKN, kalian tetap peduli dan tetap menyemangati saya dalam proses penulisan skripsi.
8. Terakhir untuk orang paling spesial, Lembah Nurani Anjar Kinanthi terima kasih telah sabar menghadapi keluh kesah penulis, selalu memberikan saran-saran berharga untuk penulisan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan dan doa tiada henti.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Tony Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada
8. Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata I. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT, sebagai amal shalih.
10. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

11. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
12. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	21
A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	35

C. Tinjauan Umum Badan Anti Korupsi	54
D. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	58
E. Tinjauan Umum <i>Independent Commission Against Corruption</i> (ICAC)..	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dan <i>Independent Commission Against Corruption</i> (ICAC) Hongkong	72
B. Persamaan Dan Perbedaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dengan <i>Independent Commission Against Corruption</i> (ICAC) Hongkong	102
C. Pembaharuan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	114
BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138

Daftar Tabel

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPK.....	85
Gambar 3.2 Struktur Organisasi ICAC.....	100
Tabel 3.1 Check & Balance ICAC HongKong dengan KPK.....	102
Tabel 3.2 Perbedaan KPK dan ICAC.....	109
Tabel 3.3 Persamaan KPK dan ICAC.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sudah ada pada awal kehidupan manusia, berdasar pada sejarah yang ada korupsi dimulai di zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, abad pertengahan, sampai dengan masa sekarang. Bentuk korupsi zaman Romawi yaitu dengan memeras wilayah jajahannya yang dilakukan oleh para jenderal untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi juga dilakukan oleh bangsawan kerajaan pada masa abad pertengahan. Jadi singkat kata korupsi merupakan masalah besar yang sudah ada sejak dulu dan terbukti tercatat oleh sejarah.¹

Korupsi pada kenyataannya adalah istilah yang baru/modern, namun bentuk dari korupsi itu sendiri telah ada sejak lama. Sekitar 2.000 tahun sebelumnya, seorang Indian yang mengisi jabatan sebagai perdana menteri, menyusun sebuah buku berjudul “*Arthashastra*” yang berbicara tentang masalah korupsi di saat itu.² Dalam riwayat Islam, pada abad ketujuh Nabi Muhammad SAW juga mewanti-wanti para pengikutnya untuk melepaskan segala jenis aktifitas yang menindas orang lain yang dikenal sebagai korupsi.³

¹ Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya : IAIN Press dan LKiS, 2006, hlm. 277.

² Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hlm. 1.

³ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003, hlm. 28.

Sebelum kemerdekaan Indonesia telah diwarnai oleh budaya korupsi yang melekat, didorong oleh niat untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Ternyata pada jaman kerajaan sebutan tahta, harta dan wanita sudah saling berkaitan.⁴ Hal ini dapat dinilai sebagai faktor penyebab kehancuran para penguasa pada masanya. Misalnya musnahnya (Sri Wijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena kebiasaan buruk korupsi sebagian besar mereka. Seperti yang di ungkapkan oleh Mochtar Lubis dan James C. Scott budaya korupsi telah dilakukan oleh para individu-individu masa lalu yaitu pada masa kerajaan di mana terletak pada organisasi patrimonial di dalam struktur kekuatan abad pertengahan. Korupsi pada jaman kerajaan mencakup para bangsawan dibawah raja, cara hidup yang sangat tertutup dan sarat dengan kecurangan mendukung budaya korupsi. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan perbuatan korupsi dalam mengambil setiap pungutan dari rakyat yang akan diserahkan kepada demang kemudian demang akan memberikan kepada tumenggung.⁵

Korupsi adalah masalah besar dan sulit. Ini bukan hanya menjadi masalah besar bagi negara Indonesia tetapi juga bagi berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Korupsi itu sendiri bukan saja merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kejahatan korupsi saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) tetapi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

⁴ St. Halimang, *Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Bildung, 2020, hlm. 5.

⁵ I Wayan Joniarta, "Banalitas Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya)", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm. 151.

Korupsi adalah jenis aktivitas atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau kumpulan individu, dan bahkan secara jelas disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum.⁶

Korupsi kini telah menjadi *public enemy* bagi masyarakat baik di Indonesia maupun internasional. Korupsi bukanlah hal baru di Indonesia, maka dari itu masalah yang paling penting saat ini untuk diselesaikan adalah masalah korupsi. Hal ini dikarenakan semakin meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia yang menjadikan semakin sulit korupsi untuk diberantas.

Pada semester pertama tahun 2020, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menemukan terdapat 169 kasus korupsi yang ditangani oleh para aparat hukum. Ada 372 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh para ahli hukum dari berbagai profesi. Nilai kerugian negara yang berhasil ditentukan adalah Rp 18,1 triliun. Sementara itu, besaran suap yang secara efektif diungkap oleh penegak hukum adalah sebesar Rp. 20,2 milyar, dan jumlah pungutan liar adalah Rp. 44,6 miliar. Secara umum, secara konsisten ada 28 kasus korupsi dengan 62 tersangka ditetapkan oleh penegak hukum. Dengan catatan tersebut maka setiap institusi penegak hukum meneliti 9 (sembilan) kasus korupsi dengan 20 tersangka setiap bulannya. Dari 169 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat hukum, 23 di antaranya atau sekitar 13,6 persen merupakan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, kasus korupsi

⁶Happy Febrina Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik", *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 32.

dengan strategi tangkap tangan sebanyak 7 (tujuh) kasus atau sekitar 4,1 persen. Sisanya, 139 kasus atau sekitar 82,3, merupakan kasus baru yang dijajaki pada semester satu tahun 2020.⁷

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia tidak hanya diam untuk menegakkan kejahatan korupsi. Upaya pemerintah untuk memusnahkan korupsi dibantu melalui kebijakan baik peraturan perundang-undangan maupun dengan cara membentuk badan anti korupsi yang memiliki kewenangan langsung dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Badan anti korupsi dalam hal ini adalah bagian dari institusi anti-korupsi berupa organisasi pemerintah yang independen atau bukan bagian dari departemen pemerintah. Tugasnya spesifik untuk menegakkan peraturan anti korupsi beserta pencegahannya. Meskipun beberapa Negara menyebut institusi ini sebagai Komisi Independen (*Independent Commission*), jenis institusi ini dalam ranah akademik umumnya lebih dikenal sebagai ACA (*Anti Corruption Agency*) dan dikategorikan dalam birokrasi pemerintahan sebagai badan public non-departemen. Para sarjana hukum biasa menyebutnya dengan *state auxiliary body*.⁸

Dibentuknya institusi badan anti-korupsi ini menurut Jeremy pope, direktur penelitian dari NGO (*Non-Governmental Organization*) anti korupsi *Transparency International* merupakan sebagai akibat dari semakin rumit dan canggihnya cara pelaku melakukan korupsi. Selain itu, institusi penegak

⁷Wana Alamsyah, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020, hlm. 12.

⁸Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 1.

hukum konvensional semacam kepolisian juga dianggap semakin tidak mampu lagi mengungkap dan membawa kasus korupsi besar ke pengadilan. Bahkan dalam sistem yang dihinngapi korupsi yang sistemik, bisa jadi mekanisme penegakan hukum konvensional telah dipenuhi dengan pejabat-pejabat yang korup juga didalamnya.⁹

Strategi pemberantasan korupsi dengan membentuk badan anti-korupsi pun menjadi semakin problematik, karena PBB pada tahun 2003 melalui konvensi anti korupsi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) meminta semua Negara yang meratifikasi konvensi tersebut untuk membentuk institusi badan anti korupsi. Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2003. Dalam berbagai survey Indonesia diklasifikasikan sebagai Negara dengan masalah korupsi terburuk.¹⁰

Transparency International (TI) menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, berdasarkan metodologi TI dari survey Indeks Persepsi Korupsi Internasional.¹¹ Pada 2003 *Transparency International* menyebut IPK Indonesia berdasarkan survey adalah 1,9 dan bersama dengan Kenya, Indonesia menjadi Negara paling korup nomor 6 dari 133 negara yang di survey oleh *Transparency International*. Menurut TI institusi yang paling sering terjadi korupsi adalah peradilan, partai politik, dan kepolisian.¹²

⁹*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰*Ibid.*, hlm 3.

¹¹TII e-newsletter_edisi_iii_Desember_2013.pdf

¹²Arin Swandari, Cisy Satwika, Lilyani Harsulistiyati, *KPK Berdiri Untuk Negeri*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019, hlm 35.

Permasalahan korupsi jika dilihat dari literatur mengenai studi korupsi dan strategi anti korupsi yang ada, banyak studi mengenainya berasal dari para ekonom dengan pendekatan positivistik, para ahli hukum dengan pendekatan legalistik, dan para ilmuwan sosial yang menggunakan pendekatan kultural. Menurut pandangan para sarjana hukum, terjadinya korupsi akibat kurangnya peraturan-peraturan anti korupsi yang dibutuhkan.

Sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, pemerintah mulai membentuk TAP MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah sungguh-sungguh memperbaiki penyelenggaraan negara yang bergantung pada prinsip-prinsip *good governance*.

Pemerintah pada tahun 2019 memperbarui regulasi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dibentuk sebab kinerja Komisi

Pemberantasan Korupsi dirasa kurang memadai, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti halnya persoalan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Khususnya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak persis sama dengan pengaturan hukum acara pidana, lemahnya koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, adanya masalah penyadapan, kurang koordinasi antara penyidik dengan penyelidik, adanya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi hukum yang berbeda, serta tidak adanya lembaga pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga terdapat cacat dan tidak adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban dan kewenangan untuk memberantas korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi.

Pembentukan lembaga antikorupsi ini tidak menjamin keberhasilan dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan juga tidak menjamin hilangnya korupsi didalam suatu negara. Survey rutin dilakukan oleh lembaga independen yaitu *Transparency international* (TI) menggunakan pendekatan *Corruption Perception Index* (CPI), CPI adalah indeks mengenai persepsi korupsi di suatu negara. Indeks ini diumumkan setiap tahun oleh *Transparency International*. CPI 2020 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat

bersih. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor tersebut berkurang 3 poin dari tahun 2019 lalu.¹³ Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) penyebab indeks persepsi korupsi Indonesia menurun disebabkan oleh 3 hal yaitu ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi, kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi dan performa KPK yang menurun dalam pemberantasan korupsi.

KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang tergolong baru, maka dari itu KPK perlu mempelajari serta menganalisa lembaga antikorupsi di Negara lain guna untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Salah satu negara yang berhasil mengatasi masalah korupsi adalah HongKong. Badan Anti Korupsi yang dimiliki oleh HongKong adalah *Independent Commision Against Coruption* (ICAC). ICAC adalah organisasi pemberantasan korupsi independen yang telah menjadi rujukan bagi beberapa negara di seluruh dunia sebagai *role model* yang efektif dalam pemberantasan kejahatan korupsi. ICAC HongKong sangat terkenal karena dianggap sebagai lembaga yang sukses dalam memerangi korupsi, menurut catatan sejarah di mana HongKong dulunya negara yang sangat korup dan sekarang HongKong adalah salah satu negara yang cukup terbebaskan dari kejahatan korupsi.

¹³Transparency International, *Korupsi Dan Integritas Politik*, Jakarta, 2020, hlm 8.

Mencermati negara HongKong yang secara efektif menjalankan aturan hukum dalam memberantas kejahatan korupsi, sehingga HongKong bisa terbebas dari korupsi. Prinsip hukum yang kuat yang dimiliki HongKong, melalui lembaga anti korupsi *ICAC* yang dianggap memiliki tugas dan kewenangan yang kuat, sehingga memudahkan *ICAC* untuk memberantas kejahatan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tentang hukum pidana korupsi yang diterapkan di luar negeri yang telah berhasil melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.¹⁴

Pada tahun 2020, HongKong menempati urutan ke 11 dari 180 negara yang memiliki skor 77/100. Pada tahun 2019 HongKong memiliki skor 76 dan menempati urutan ke 16 dari 180, hal ini membuktikan keefektifan dan keseriusan *ICAC* HongKong dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. *ICAC* HongKong merubah strategi pemberantasan korupsi yang dulunya menggunakan strategi penindakan efek jera yang maksimal, yaitu dengan hukuman mati mengubah strateginya menjadi ke arah pencegahan dan membatasi strategi penindakan karena terbukti hukuman mati atas pelaku korupsi tidak menimbulkan efek pencegahan dan efek jera yang signifikan.¹⁵

Apa yang menjadi penyebab kesulitan KPK dalam melakukan strategi anti korupsinya? Dalam studi ini penulis mengembangkan argumen lebih

¹⁴Cynthia Dewi Kusumastuti, Ismunarno, “Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Recidive*, Volume 4, Nomor 3, September- Desember 2015, hlm 275.

¹⁵Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta:Gramedia, 2017, hlm 129.

lanjut bahwa institusi badan anti-korupsi KPK ini tidak bisa memaksimalkan kemampuannya untuk mengimplementasikan strategi anti korupsi seperti *ICAC* sebagai *role model*, karena pola hubungan institusi-institusi politik dengan KPK berbeda dengan pola hubungan institusi-institusi politik HongKong dengan *ICAC*. Akibatnya, dukungan kemauan politik dari institusi-institusi politik dengan dua sistem politik yang berbeda berakibat pada perbedaan tingkat dukungan politik bagi kedua institusi anti korupsi ini juga.

Selanjutnya *ICAC* HongKong akan dibandingkan dengan KPK Indonesia yang telah mencoba melakukan rekayasa institusi seperti di HongKong. Dengan melihat bagaimana institusi badan anti korupsi membuat perencanaan dan implementasi strategi anti-korupsi, seperti apa perbandingannya, dan mengapa terdapat persamaan dan perbedaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Indonesia dan *independent commission against corruption (ICAC)* HongKong?
2. Apa persamaan dan perbedaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi antara komisi pemberantasan korupsi (KPK) Indonesia dengan *independent commission against corruption (ICAC)* HongKong?

3. Bagaimana pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Indonesia dan *independent commission against corruption (ICAC)* HongKong.
2. Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong.
3. Untuk menganalisa pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya.

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang strategi pencegahan pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan *independent commission against corruption* HongKong.
- b. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang adanya persamaan dan perbedaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan *independent commission against corruption* HongKong.
- c. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna di kemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian yang mendasari beberapa karya untuk membantu penyusun dalam mengarahkan penelitian ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat

dihindari. Sebagian dari tulisan tersebut cukup banyak diidentifikasi dengan objek eksplorasi dan proposisi ini. Karya pustaka tersebut antara lain:

Mega anjarsari, 2010, “Studi komparasi hukum pengaturan asas mekanisme pengambil alihan perkara (takeover mechanism principles) dalam penyidikan perkara korupsi menurut undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (kpk) dengan hongkong independent commission against corruption”, persamaannya adalah membahas mengenai perbandingan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dengan hongkong. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, membahas tentang persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambil alihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi. Yang kedua, membahas tentang kecenderungan umum dalam perkembangan universal dalam bidang penyidikan korupsi berdasarkan perbandingan tersebut.¹⁶

Muhammad farhan, 2013, “Perbandingan pola kerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi indonesia independence commission against corruption hongkong”, persamaannya adalah membahas perbandingan lembaga anti korupsi di Indonesia dengan lembaga ICAC HongKong. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, membahas tentang perbandingan pola kerja pemberantasan lembaga KPK Indonesia dengan

¹⁶ Mega Anjarsari, *Studi Komparasi Hukum Pengaturan Asas Mekanisme Pengambil Alihan Perkara (Takeover Mechanism Principles) Dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dengan Hongkong Independent Commission Against Corruption*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

ICAC HongKong. Yang kedua, Membahas mengenai pengertian korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi, pemberantasan korupsi dan *united nations convention against corruption (uncac)*.¹⁷

Muhammad syafiq ridho, 2015, “Efektifitas kinerja pemberantasan korupsi dalam bidang penindakan, persamaannya adalah membahas tentang KPK (latar belakang berdirinya, tugas dan wewenang). Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, membahas mengenai Negara hukum, demokrasi dan pemberantasan korupsi. Yang kedua membahas efektivitas KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi.¹⁸

Rizqi nurul awaliyah, 2017, “Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan china dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”, persamaannya adalah membahas perbandingan lembaga anti korupsi di dua Negara yang berbeda, perbedaannya adalah yang pertama pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan China, dan yang kedua adalah upaya pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁹

¹⁷ Muhammad farhan, *Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Independence Commission Against Corruption Hongkong*, Skripsi Sarjana Kriminologi, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013.

¹⁸ Muhammad syafiq ridho, *Efektifitas Kinerja Pemberantasan Korupsi Dalam Bidang Penindakan, Persamaannya Adalah Membahas Tentang KPK (Latar Belakang Berdirinya, Tugas Dan Wewenang)*, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

¹⁹ Rizqi Nurul Awaliyah, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan China Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.

Sarmadan Pohan, 2018, “Perbandingan lembaga anti korupsi di indonesia dan beberapa negara dunia”, persamaannya adalah membahas perbandingan lembaga anti korupsi di sebuah Negara, perbedaannya adalah membahas mengenai cara kerja dari lembaga-lembaga anti korupsi di negara-negara dunia dan dibandingkan dengan Indonesia.²⁰

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian hukum menurut Morris L. Cohen didalam buku Peter Mahmud, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengatakan bahwa Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Elizabeth Nurhaini berpendapat bahwa penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dan mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala hukum tertentu yang kemudian melakukan analisa pada gejala hukum tersebut. Dalam penelitian hukum yang menjadi objek bahasannya adalah

²⁰ Sarmadan Pohan, “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia”, *Jurnal Justitia*, Volume 1, Nomor 01, 2018.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Tigabelas, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 57.

hukum atau kaidah (norma). Tujuan dari penelitian hukum adalah mencari atau menemukan kebenaran dalam disiplin ilmu hukum.²²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berdasarkan pada aturan perundang-undangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Menurut Elizabeth Nurhaini dalam bukunya mengatakan bahwa, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama di Indonesia adalah undang-undang. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan. Teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif ini digunakan untuk mencoba

²²Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:PT.Refika Aditama,2018, hlm 49-50

melihat perkembangan negara HongKong yang sebelumnya memiliki masalah korupsinya cukup buruk dan kemudian berubah menjadi lebih baik melalui pembentukan institusi badan anti-korupsi bernama *ICAC*. Selain itu, pendekatan ini juga diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai persamaan dan perbedaan diantara kedua badan anti korupsi mengenai strategi dalam pemberantasan korupsi. Dalam penelitian ini penulis membandingkan strategi badan anti korupsi di dua negara yaitu Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* HongKong.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD Negara RI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan (hukum adat), yurisprudensi, doktrin atau traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan *Independent Commission Against Corruption Ordinance chapter 204*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki diantaranya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal tentang hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), teknik komunikasi, dan studi dokumen (studi kepustakaan). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Maka dari itu, teknik analisis yang

digunakan adalah logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan melihat fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Analisa kualitatif sendiri memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, Bab I merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Konseptual, Bab II menguraikan tentang norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul. Bab II ini menguraikan tentang norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat meliputi pengertian teori perbandingan hukum, tindak pidana korupsi, badan anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia), *Independent Commission Against Corruption* (Hongkong)

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab III ini menguraikan data atau informasi hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan. Akan tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu disusun sesuai aturan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstalisasikan dengan tinjauan konseptual. Bab III ini Berisi tentang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* HongKong, apa persamaan dan perbedaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* HongKong, dan pembaruan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Bab IV: Penutup, Bab IV merupakan kristalisasi yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya dan menegaskan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas. Bab terakhir dari skripsi ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

1. Sejarah Perbandingan Hukum

Sejarah terbentuknya perbandingan hukum dalam ilmu hukum yaitu sejak studi perbandingan hukum telah dimulai ketika Aristoteles (384-322 SM) melakukan penelitian terhadap 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya yang dimuat dalam bukunya yang berjudul *Politics*. Solon juga melakukan penelitian atau studi perbandingan hukum ketika menyusun hukum Athena (650-558 SM).²³ Studi perbandingan hukum berlanjut pada abad pertengahan dimana dilakukan studi perbandingan antara hukum Kanonik²⁴ dan hukum Romawi, dan pada abad 16 di Inggris telah memperdebatkan kegunaan hukum kanonik dan hukum kebiasaan.²⁵

Studi perbandingan tentang hukum kebiasaan di Eropa pada waktu itu telah dijadikan dasar penyusunan asas-asas hukum perdata (*ius civile*) di Jerman. Perkembangan perbandingan hukum sebagai ilmu, relatif baru dimana istilah *comparatif law* atau *droit compare*

²³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2000, hlm.1.

²⁴ Hukum kanonik adalah hukum gereja Katolik yang merupakan terjemahan dari Bahasa Latin *Codex Iuris Canonici*. Kitab hukum ini memuat berbagai macam aturan hidup bagi semua kaum Katolik.

²⁵ *Ibid.*, hlm.1.

baru dikenal dan diakui penggunaannya yang dimulai di daerah Eropa. Perkembangan pesat perbandingan hukum menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum adalah bagian kedua pertengahan abad ke-18 yaitu yang dikenal sebagai era kodifikasi. Perkembangan pengakuan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum baru menghadapi kendala-kendala, antara lain disebabkan telah berabad lamanya, ilmu hukum yang sesuai dengan perintah Tuhan dan bersumber pada hukum alam (*natural law*) serta mencapai cita ke-layakan, dan sangat kurang memperhatikan hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum.

Studi tentang hukum positif ketika itu diabaikan di perguruan tinggi, yang hanya mengajarkan hukum Romawi dan hukum Kanonik. Sekalipun pengakuan terhadap perbandingan hukum sebagai disiplin hukum terjadi pada abad ke 19, akan tetapi perkembangan yang sangat pesat terjadi pada abad ke-20. Adolf F. Schnitzer mengemukakan, bahwa baru pada abad ke-19 perbandingan hukum itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum dan yang menjadi pertanyaan mendasar yang dikembangkan pada abad ke-19 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sifat perbandingan hukum;
- b. Kedudukan perbandingan hukum dalam kerangka ilmu hukum;
- c. Karakteristik dan metode perbandingan hukum;
- d. Kemungkinan penerapannya dan kegunaan yang bersifat umum;

- e. Kontroversi tentang perbandingan hukum yang berdiri sendiri dan perbandingan hukum sebagai metode.

Menurut Rene David perkembangan perbandingan hukum pada abad ke-19 itu terutama terjadi di Eropa (khususnya Jerman, Prancis, Inggris), dan Amerika. Pada mulanya minat terhadap studi perbandingan hukum bersifat perseorangan, seperti dilakukan oleh Montesquieu (Prancis), Mansfield (Inggris), dan Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (di Jerman). Kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan.²⁶

Pada tahun 1832 di Prancis berdiri Institut Perbandingan Hukum di *College de France* dan tahun 1846 berdiri Institut Perbandingan Hukum di *University of France*. Sedangkan di Inggris pada tahun 1846, sebuah Panitia Pendidikan Hukum (di bawah pengawasan *House of Common*) mengajukan rekomendasi agar di Perguruan-perguruan Tinggi di Inggris dibentuk institut tentang perbandingan hukum. Usul ini berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Inggris yang menghadapi berbagai sistem hukum asing di negara-negara jajahan (misal Hukum Hindu di India). Usul tersebut terwujud pada 1869 dengan terbentuknya badan/lembaga *Historical*

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 hlm. 1.

and Comparative Jurisprudence di Oxford dengan ketuanya Sir Henry Maine.

Mr. J.P.H. Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland* menjelaskan bahwa perbandingan hukum (*rechtsvergelijking*) merupakan cabang ilmu hukum yang membandingkan hukum-hukum yang berlaku di berbagai negara dan menyelidiki persamaan serta perbedaan dari peraturan-peraturan hukum tersebut. Ilmu perbandingan hukum dapat dan sering memberikan jalan untuk mengambil alih ketentuan-ketentuan hukum asing. Di samping itu perbandingan hukum menunjukkan prinsip-prinsip hukum yang sama dalam berbagai tertib hukum dan karenanya meletakkan dasar bagi hukum internasional.²⁷

Sejak permulaan abad ke-20 perbandingan hukum berkembang sangat pesat. Pada waktu itu terjadi konferensi - konferensi internasional di Den Haag mengenai hukum internasional yang menghasilkan traktat-traktat di lapangan transpor kereta api, pos, hak cipta hak milik industri, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan itu dimungkinkan dan dipersiapkan oleh studi perbandingan hukum. Oleh karena itu, studi ini dianggap demikian penting sehingga ditarik kesimpulan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu

²⁷ J.H.P. Bellefroid, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Dekker & Van de Vegt N.V., Nijmegen, 1950, hlm. 17.

pengetahuan yang berdiri sendiri. Sehubungan dengan hal ini Rene David menyatakan:

"today comparative law studies are admitted to be a necessary part of any legal science and training".

terjemahan bebasnya adalah bahwa saat ini studi mengenai perbandingan hukum telah diakui sebagai bagian yang sangat penting/diperlukan dari ilmu hukum dan pendidikan hukum.²⁸

Melakukan studi perbandingan hukum pada dasarnya adalah memperbandingkan bermacam-macam sistem hukum. Menurut John Henry Meryman, sistem hukum merupakan istilah yang digunakan untuk seperangkat lembaga hukum, prosedur hukum, dan peraturan hukum yang berlaku. Sistem hukum nasional sering dikelompokkan dalam keluarga hukum. Dengan demikian sistem hukum Inggris, New Zealand, Amerika Serikat, misalnya dapat dikelompokkan ke dalam sistem *Common Law* karena mempunyai lembaga hukum, proseder hukum, dan peraturan hukum yang identik. Sedangkan sistem hukum Perancis, Belanda, Jerman, Italia, dan Swiss, demikian juga Argentina, Brasil dan Chile, termasuk dalam sistem *Civil Law* dengan alasan serupa.²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm.2.

²⁹ John Henry Meryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Western Europe and Latin America, Second Edition, Stanford: Stanford University Press, 1985.* hlm. 1.

Dalam perkembangannya sekarang, perbandingan hukum tidak mempunyai objek tersendiri, tetapi mempelajari hubungan hubungan sosial yang telah menjadi objek studi dari cabang cabang hukum yang telah ada. Jadi lebih merupakan suatu metode keilmuan/penelitian dalam memahami objek ilmu hukum.

2. Pengertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rectsvergleichung* atau *Ver-gleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Pentingnya kajian komparatif dalam rangka mewujudkan rekonstruksi sistem hukum pidana nasional dimaksudkan untuk mempelajari konsep/sistem hukum lain yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia.³⁰

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang mengkonstruksikan pembagian pendekatan keilmuan hukum pidana dari sudut pembagian jenis-jenis kajian Ilmu Hukum pidana, yang terbagi menjadi tiga pendekatan yaitu:³¹

³⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Semarang: Unissula Press, Cetakan ke 2, 2013, hlm. 1.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religijs Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011, hlm. 2-3.

- a. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif (dapat disebut pendekatan/orientasi juridis ilmiah/ teoritik).
- b. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada kebijakan/pembaharuan hukum pidana (pendekatan/ orientasi juridis berwawasan kebijakan nasional/ BANGKUMNAS/ politik hukum pidana).
- c. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada bahan perbandingan (pendekatan/orientasi juridis berwawasan global/komparatif).

Perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian/keilmuan juga dinyatakan oleh Rudolf D.Schlessinger antara lain:

- a. *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
- b. *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not body of rules and principles*).
- c. *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the*

*technique of dealing with actual foreign law elements of legal problem).*³²

Menurut Romli Atmasasmita, apabila diamati istilah asingnya, *comparative law*, maka dapat diartikan bahwa, titik berat adalah pada perbandingannya atau *comparative*, karena kata *comparative* memberikan sifat kepada hukum yang diperbandingkan. Istilah perbandingan hukum, dengan demikian menitik beratkan pada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti sedalamnya dari pengertian istilah perbandingan hukum, adalah membandingkan sistem-sistem hukum.³³

Menurut Frans Marimis, obyek perbandingan hukum pidana harus menyangkut sekurang-kurangnya dua sistem hukum pidana. Ulasan mengenai hukum pidana suatu Negara asing belum dapat dinamakan perbandingan hukum pidana, melainkan baru merupakan suatu telaah hukum asing. Sekalipun demikian telaah hukum asing itu sangat penting karena dari sini dapat diperoleh bahan-bahan guna diperbandingkan dengan sistem hukum pidana lainnya. Dalam hal ini

³² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Op.cit. 2010, hlm 5.

³³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996 hlm. 7.

yang penting untuk dibandingkan bukanlah hanya peraturan-peraturan hukum pidananya saja melainkan juga prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang melandasi peraturan-peraturan tersebut.³⁴

Sementara itu Andi Hamzah berpendapat bahwa ada pakar yang hanya membandingkan bagian ketentuan umum atau yang berisi asas-asas hukum pidana dari beberapa KUHP tanpa membandingkan rumusan delik atau ketentuan khususnya. Jadi yang diutamakan di sini adalah asas hukum pidana suatu bangsa. Dalam hal ini ada pula yang hanya menyebut asas-asas itu tanpa menjelaskan apa yang sama dan apa yang berbeda antara asas-asas itu. Maka menurut Andi Hamzah, jika kita melakukan perbandingan hukum (hukum pidana), semestinya kita menjelaskan tentang apa persamaan dan perbedaan antaranya.³⁵

3. Manfaat dan Tujuan Perbandingan Hukum

Kegunaan studi perbandingan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional, menurut Romli Atmasasmita harus diartikan bahwa dengan mempelajari perbandingan hukum maka terutama pembentuk undang-undang dan juga hakim dapat mengetahui proses terjadinya suatu asas-asas hukum tertentu dalam sistem hukum asing

³⁴ Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994 hlm. 11.

³⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ketiga, 2008, hlm. 8.

atau setidaknya dapat diketahui cara sistem hukum asing bekerja sehingga pembentuk undang-undang dan hakim dapat mengambil manfaat dari bekerjanya sistem hukum asing tersebut.³⁶

Pentingnya pendekatan komparatif dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional menurut Barda Nawawi Arief juga disebabkan antara lain:³⁷

- a. Adanya asas nasional aktif dalam KUHP, yaitu Pasal 5 ayat 1 ke-2, bahwa “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana”.
- b. Adanya beberapa ketentuan dalam UU di luar KUHP yang memperluas yurisdiksi teritorial ke luar wilayah Indonesia (antara lain Pasal 97 UU Narkotika, Pasal 16 UU Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 (1) dan Pasal 4 UU terorisme, Pasal 7 UU Pencucian Uang, Pasal 2 UU ITE No.11/2008).
- c. Banyaknya UU yang telah meratifikasi berbagai ketentuan/dokumen internasional (a.l. UU No.27/1997 mengesahkan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic*

³⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: PT.Fikahati Aneska, 2009, hlm.23-24.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, *Op.cit.* 2010, hlm 31-32.

- in Narcotic Drugs and pscyhotropic Substances*, 1998; UU No.5/1998 mengesahkan *Convention Againts Turtore and Oth-er Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment*; UU No.11/2005 meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; UU No.12/2005 meratifikasi IC-CPR; UU No.5/2006 meratifikasi *International Convention For the Suppression of Terorist Bombings*, 1997; UU No.6/2006 meratifikasi *Internatioal Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999; UU No.7/2006 meratifikasi *UN-CAC (United Nations Convention Against Corruption 2003)*.
- d. Adanya berbagai UU tentang perjanjian bilateral, dan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana atau *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (antara lain UU No.1/2006, UU.No.8/2006)
 - e. Adanya perkembangan Cyber crime yang merupakan “*trans-border/transnational crime*”.

Manfaat membandingkan hukum menurut Rene David dan Bri-erly yaitu untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain

serta dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan /suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.³⁸

Menurut Tahir Tungadi manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum adalah berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional. Mempelajari perbandingan hukum juga berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional. Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi para hakim pada pengadilan internasional) hal ini penting untuk menentukan *the general principal of law* yang merupakan sumber yang penting dari hukum publik internasional.

Dari penjelasan di atas mengisyaratkan perlunya pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada pendekatan komparatif. Demikian juga usaha pembaharuan/rekonstruksi hukum perlu ditunjang dengan pendekatan perbandingan seperti berbagai pendapat tentang manfaat dan tujuan dari perbandingan hukum yang diungkapkan oleh para ahli perbandingan hukum di bawah ini yaitu dari Esin Ocuru:³⁹

³⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 2008, hlm. 17.

³⁹ Esin Ocuru, Dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Op-cit, hlm.12.

“Comparative law is legal discipline at ascertaining similarities and differences and finding out relationship between various legal system, their essence and style looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.”

Sedangkan Van Apeldorn mengemukakan tujuan praktis studi perbandingan hukum adalah merupakan alat untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.

Menurut S.R.Sianturi manfaat mempelajari perbandingan hukum pidana antara lain:⁴⁰

- a. Kita akan dapat melihat dan merasakan kekuatan dan kelemahan dari hukum pidana kita sendiri. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa hukum pidana kita yang berlaku dewasa ini adalah warisan dari penjajahan Belanda dan resminya masih berbahasa Belanda. Sekalipun sudah ditambal-sulam di sana-sini, namun masih perlu pembaharuan.

⁴⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Op. Cit., hlm. 8.

- b. Dengan lebih mengenal kekuatan dan kelemahan itu niscaya akan timbul gagasan-gagasan untuk memperbaiki kelemahan itu yang jika perlu mempelajari kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam hukum pidana asing itu, lalu dinilai kesesuaiannya dengan kebutuhan kita.
- c. Dengan mempelajari jiwa dari hukum pidana asing itu dalam perbandingannya dengan yang kita miliki, juga akan meningkatkan cita-rasa hukum dan sekaligus memperluas cakrawala pandangan kita.
- d. Pengetahuan dalam rangka perbandingan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaharui hukum pidana kita yang sekarang ini.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka penting melakukan kajian terhadap pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global, karena menurut Sudarto kajian komparatif dapat membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri dan menurut Soerjono Soekanto dapat juga untuk pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.

Pemecahan masalah yang dimaksud di atas menurut Barda Nawawi Arief, tentunya tidak didasarkan pada sumber bahan perbandingan (misal KUHP asing), tetapi tetap didasarkan pada hukum positif. Namun penerapannya berlandaskan “sikap kritis” kita terhadap hukum positif itu, setelah melakukan komparasi. Dengan sikap

kritis berdasarkan kajian komparatif itulah diharapkan dapat lebih dicapai pemecahan masalah “secara adil dan tepat”.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Mendefinisikan korupsi secara universal cukup sulit dilakukan, karena dalam merumuskan korupsi itu sendiri pun tergantung dari pendekatan-pendekatan yang ada dalam penggunaannya. Heidenheimer dan Johnston mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga variasi dari pendefinisian korupsi yang telah berkembang saat ini, yaitu berdasarkan *public office centered*, *market-centered*, dan *public interest centered*.⁴²

Definisi yang berkembang berdasarkan *public office centered* menekankan konsepnya terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik yang bekerja di pemerintahan dengan melakukan penyimpangan dari norma-norma yang seharusnya ada. Definisi yang berkembang berdasarkan *market-centered* cenderung tidak menekankan perlunya norma yang ada, tetapi lebih kepada pencarian kesempatan untuk memaksimalkan kegunaan yang mungkin bisa dilakukan untuk pencarian keuntungan pribadi. Variasi dari

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴² Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston, *Political Corruption: Concepts and Contexts*, New Jersey: Transaction Publisher, 2007, hlm. 7.

definisi yang berkembang berdasarkan *public interest-centered* cenderung berusaha untuk lebih longgar dalam pendefinisian korupsinya dan mengarah tidak saja pada aturan-aturan yang ada, karena bisa saja aturan-aturan yang ada justru digunakan oleh pejabat publik untuk korupsi.⁴³

Untuk kepentingan penelitian ini, maka definisi korupsinya akan merujuk pada definisi berdasarkan *public office centered*. Definisi berdasarkan *public office centered* bisa dilihat dari pendapat Joseph S. Nye, seorang ilmuwan politik, yang mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari pekerjaan-pekerjaan normal dalam peran publik karena berkenaan pribadi (keluarga, kelompok dekat keluarga kebutuhan keuangan atau meningkatkan status, atau melanggar aturan dengan tindakan-tindakan demi kepentingan pribadi). Perilaku ini seperti penyuapan (penggunaan hadiah untuk menyelenggarakan penilaian seseorang yang telah mendapat kepercayaan); nepotisme (pemberian dari patron dengan alasan hubungan yang telah dikerjakan dan tidak berdasarkan merit); dan penyalahgunaan wewenang (penggunaan ilegal sumber daya publik untuk kepentingan pribadi berkenaan dalam penggunaannya).

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dalam terminologi fikih

⁴³ *Ibid.*, hlm. 8.

Islam korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah korupsi identik dengan suap (*risyah* dan menyalahgunakan wewenang (*at tajawwuz fi isti'mal al-haq*). Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian (*sariqah*) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan (*al nahb*).⁴⁴ Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia.⁴⁵

Menurut *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, mengartikan korupsi sebagai berikut :

*“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.”*⁴⁶

“Secara bebas dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.”

⁴⁴ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 31.

⁴⁵ H. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 3.

⁴⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations Sixth Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990, hlm. 345.

Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan yaitu: pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan menghilangkan keadilan. Kedua, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. Ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Temuan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup menyebabkan harga diri kita sebagai bangsa menjadi ternoda.⁴⁷

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun Masyarakat Transparansi Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Perkembangan di Indonesia dalam mendefinisikan tentang tindak pidana korupsi selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh adanya suatu sifat dinamis terhadap pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan kondisi masyarakat yang selalu berubah.

⁴⁷ Ria Casmi Arrsa: *Korupsi Cermin Kolonialisme, Kanker Demokrasi dan Optimisme Terhadap Pemberantasannya*, www.legalitas.org, diakses tanggal 10 Maret 2021.

H.A.Brasz memberikan pengertian korupsi dalam sudut pandang sosiologis sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang korup dari yang dialihkan, atau sebagai penggunaan kekuasaan yang dilakukan secara diam-diam dan kemudian dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat daripada kekuasaan yang dimilikinya itu ataupun dilihat dari kemampuan formal si pelaku, bertujuan untuk merugikan kekuasaan asli dan memiliki tujuan lain untuk menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan jabatan sahnyanya itu”.⁴⁸

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi, tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, begitu pula cara penanggulangannya.⁴⁹ Menurut Nico Andrianto dan Ludy Prima Johansyah, bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke seolah-olah dipersatukan dengan semangat korupsi yang sudah menebus liur di tengah era otonomi daerah saat ini, dengan berbagai macam sebutan antara lain :⁵⁰

- a. Uang tip : budaya amplop yakni memberikan uang ekstra kepada seseorang karena jasanya/pelayanannya, istilah ini muncul

⁴⁸ Lubis, Mochtar dan James S. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, Cetakan ke 3, 1995, hlm. 4.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 7.

⁵⁰ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

karena pengaruh budaya barat yakni pemberian uang ekstra kepada pelayan restoran atau hotel.

- b. Angpao: pada awalnya muncul untuk menggambarkan kebiasaan yang dilakukan oleh etnis Cina yang memberikan uang dalam amplop kepada penyelenggara pesta, dalam perkembangan selanjutnya, hingga saat ini istilah ini digunakan untuk menggambarkan pemberian uang kepada petugas ketika mengurus sesuatu di mana pemberian ini sifatnya tidak resmi atau tidak ada dalam peraturan.
- c. Uang administrasi: pemberian uang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus agar penyelesaiannya cepat selesai.
- d. Uang diam: pemberian dana kepada pihak pemeriksa agar kekurangan pihak yang diperiksa tidak ditindaklanjuti. Biasanya diberikan kepada anggota DPRD ketika memeriksa pertanggungjawaban walikota/gubernur pertanggungjawabannya lolos.
- e. Uang bensin: uang yang diberikan sebagai balas jasa atas bantuan yang diberikan oleh seseorang yang akrab satu sama lain.
- f. Uang Pelicin: menunjuk pada pemberian sejumlah dana (uang) untuk memperlancar (mempermudah) pengurusan perkara atau surat penting.

- g. Uang ketok: uang yang digunakan untuk memengaruhi keputusan agar keputusan berpihak kepada pemberi uang, istilah ini biasanya ditujukan kepada hakim dan anggota legislatif yang memutuskan perkara atau menyetujui/mengesahkan anggaran usulan eksekutif dilakukan secara tidak transparan
- h. Uang kopi: uang tidak resmi yang diminta oleh aparat pemerintah atau kalangan swasta, permintaan ini sifatnya individual dan berlaku di masyarakat umum.
- i. Uang pangkal: uang yang diminta sebelum melaksanakan suatu pekerjaan/kegiatan agar pekerjaan tersebut lancar.
- j. Uang rokok: pemberian uang yang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/ kasus penyelesaiannya cepat.
- k. Uang damai: digunakan ketika menghindari sanksi formal dan lebih memberikan sesuatu biasanya berupa uang/materi sebagai ganti rugi sanksi formal.
- l. Uang di bawah meja: pemberian uang tidak resmi kepada petugas ketika mengurus/membuat surat penting agar prosesnya cepat.
- m. Tahu sama tahu: digunakan di kalangan bisnis atau birokrat ketika meminta bagian/sejumlah uang, maksudnya antara yang meminta dan yang memberi uang sama-sama mengerti dan hal tersebut tidak perlu diucapkan.

- n. Uang lelah: biasanya diminta oleh orang yang diminta bantuannya untuk membantu orang lain, sering digunakan oleh birokrat ketika melayani masyarakat untuk mendapatkan uang lebih.

2. Bentuk-Bentuk Korupsi

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 Indonesia berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 skor tersebut berkurang 3 poin. Dengan adanya kondisi seperti ini maka diperlukan adanya evaluasi untuk para aparat penegak hukum dalam menyusun atau merancang strategi tertentu dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, ada 30 macam tindak pidana Korupsi. Yang mana terdiri atas⁵¹.

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara;
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, dan dapat merugikan keuangan Negara;
- c. Menyuap pegawai negeri;

⁵¹ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majestya, Palu Hakim Versus Rasa Keadilan, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 5-11.

- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
- e. Pegawai negeri menerima suap;
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- g. Menyuap hakim;
- h. Menyuap advokat;
- i. Hakim dan advokat menerima suap;
- j. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- k. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- l. Pegawai negeri merusakkan bukti;
- m. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
- n. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
- o. Pegawai negeri memeras;
- p. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain;
- q. Pemborong berbuat curang;
- r. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- s. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- t. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- u. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- v. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;

- w. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
- x. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK;
- y. Merintang proses pemeriksaan;
- z. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
- aa. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- bb. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- cc. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- dd. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari 30 berbagai macam bentuk Tindak Pidana korupsi kemudian selanjutnya dapat dikelompokkan lagi menjadi :

- a. Kerugian keuangan negara

Menurut pendapat Komariah pada UU No. 31/1999 menganut pandangan kerugian negara dalam bentuk delik formil. Unsur dari "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan menjadi merugikan negara secara langsung ataupun secara tidak langsung. Artinya, suatu perbuatan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara ketika perbuatannya itu memicu kerugian negara. Penjelasan tersebut bisa dilihat pada pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 pada ayat tersebut tertulis kata "dapat"

kemudian diikuti kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” hal ini menjadikan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya suatu kejahatan korupsi cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah tertuang pada undang-undang bukan harus ada akibatnya terlebih dulu.

b. Suap-menyuap

Definisi dari suap - menyuap tertera pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap:

- Pasal 2

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

- Pasal 3

“menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

c. Penggelapan dalam jabatan

Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan merupakan suatu kejahatan yang mirip dengan tindakan pencurian yang tertera didalam pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah jika kejahatan pencurian barang tersebut belum ada dimiliki pencuri dan pencuri harus mengambilnya berbeda penggelapan yang mana dalam hal ini barang itu sudah ada ditangan dan dimiliki oleh si pembuat namun tidak mamakai jalan kejahatan.

Menurut rumusan Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, Penggelapan dengan Pemberatan dan Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merujuk kepada Penggelapan dengan Pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

d. Pemerasan

Berdasarkan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pemerasan adalah tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

e. Perbuatan curang

Untuk memahami unsur perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, mari kita lihat tumpukan pasal 7 dan pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

- Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d :
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan

perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- Pasal 7 ayat (2) menyebutkan:

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

- Pasal 12 huruf h:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Seorang pegawai negeri yang mempunyai benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dimana ia memegang penuh kekuasaan atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang yang kemudian memiliki atau diduga mempunyai kepentingan tersendiri atas setiap wewenang yang dimilikinya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya. Faktor penyebab konflik kepentingan tersebut adalah kekuasaan dan kewenangan pegawai negeri, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi.

g. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

- Ayat (1) : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- 1) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:

- Ayat (2) : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Sebab-Sebab Korupsi

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dipengaruhi oleh beberapa sebab, banyak para ahli yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi yaitu sesuai rumus "*GONE teori*" oleh Jack Bologne yang berarti *Greeds, Opportunities, Needs, Exposure* (keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan). Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Gayus Lumbun dan Tjan dra Sri Djaja bahwa korupsi di Indonesia karena tiga hal antara lain *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan), *corruption by greed* (korupsi karena keserakahan), *corruption by chance* (korupsi karena kesempatan).⁵²

⁵² Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 42.

Berbeda dengan kedua teori di atas Prof. Dr. H. Mucsin, menyebutkan ada tiga hal penyebab korupsi, yaitu niat (muncul dari diri orang tersebut), kesempatan (muncul karena sistem yang jelek), keberanian (karena tidak ada efek jera/bodoh).⁵³ Pendapat berbeda diungkapkan oleh Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, menyebut ada empat faktor yaitu kurang gaji/ pendapatan, latar belakang kebudayaan, manajemen yang kurang baik, dan modernisasi.⁵⁴

Menurut pendapat Prof. Dr. Baharuddin Loppa terdapat 11 penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:⁵⁵

- a. Kerusakan moral;
- b. Kelemahan sistem;
- c. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
- d. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum;
- e. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
- f. Pungli;
- g. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;
- h. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup;
- i. Perlunya peningkatan mekanisme control oleh dpr

⁵³ Agus Kasiyanto, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 13-21

⁵⁵ Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997, hlm. 171-172

- j. Lemahnya perundang-undangan yang ada;
- k. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab.

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua dalam buku Ermansjah Djaja: "Tipologi Tindak Pidana Korupsi", menyatakan bahwa berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:⁵⁶

- a. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru.
- b. Kompensasi PNS yang rendah.
- c. Pejabat yang serakah.
- d. *Law enforcement* tidak berjalan.
- e. Hukuman yang ringan terhadap koruptor.
- f. Pengawasan yang tidak efektif.
- g. Tidak ada keteladanan pemimpin.
- h. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Menurut Mochammad Jasin Wakil Ketua KPK, ada lima hal penyebab utama korupsi di Indonesia, yaitu:

- a. Rendahnya integritas dan profesionalisme.

⁵⁶ Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2010, hlm. 49-51.

- b. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan.
- c. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi.
- d. Sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu.
- e. Sistem penggajian yang tidak professional.

Menurut pandangan agus kasiyanto daloam bukunya berpendapat bahwa orang yang menjadi koruptor pada saat ini penyebabnya kemungkinan besar dahulu pernah menjadi korban dari ulah para koruptor sebelumnya, sebagai misal seorang PNS yang suka memungli kalau kita dekati (wawancarai) kemungkinan besar dahulu waktu masuk menjadi CPNS sudah pernah menjadi korban pemerasan atau penyuapan. Seorang penegak hukum yang mempermainkan perkara kemungkinan besar dahulu bernasib hampir sama dengan CPNS tersebut di atas, atau sekarang dalam melaksanakan tugasnya ditekan untuk melakukan korupsi oleh pimpinannya yang korup. Bandingkan dengan para pedofila (orang yang suka mencabuli/menyodomi anak kecil setelah ditelusuri kebanyakan para pengidap pedofilia dahulu waktu masih kanak-kanak hampir pernah menjadi korban para pedofilia. Sehingga penulis berpandangan bahwa para koruptor hampir selalu dapat dikatakan mirip dengan para pedofilia, yaitu hampir pernah menjadi korban koruptor/pedofilia terdahulu. Oleh karena itu, apabila kita

menginginkan adanya para pengawal Negeri atau para penegak hukum, yang tidak melakukan tindak pidana korupsi harus dipastikan bahwa semasa hidupnya tidak pernah menjadi korban para koruptor, sehingga penyakit tersebut tidak menular atau menghinggapinya.⁵⁷

M. Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa koruptor sekarang ini muncul karena ada proses kaderisasi atau regenerasi dari para koruptor yang telah dahulu melakukan tindak pidana korupsi hingga tampak bahwa para pelaku korupsi masih tergolong muda. Sehingga harus diputus mata rantai pola pengkaderan/regenerasi antar para generasi koruptor.

C. Tinjauan Umum Badan Anti Korupsi

Peran institusi badan anti-korupsi berbeda dengan institusi pemerintahan lainnya yang juga berurusan dengan pemberantasan korupsi semacam kepolisian, atau semacam tim khusus yang dibentuk pemerintahan. Usaha itu seringkali bersifat sementara dan berjumlah sedikit personilnya. Badan anti-korupsi mempunyai ciri khas yaitu memiliki tujuan besar untuk memberantas korupsi, memiliki organisasi yang rapi terpisah dari departemen pemerintahan, dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap peluang korupsi.⁵⁸

⁵⁷ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 44.

⁵⁸ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op. Cit., hlm. 33.

Badan anti-korupsi pertama yang independen dari kepolisian setidaknya bisa dilihat kemunculannya di negara-negara yang dikuasai pemerintahan kolonial Inggris setelah perang dunia kedua. Dimulai di Singapura sejak tahun 1952, dibentuklah institusi badan anti-korupsi bernama *CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau)*. Meagher menjelaskan bahwa sebenarnya embrio bentuk badan anti korupsi ini bisa dilacak dari semacam pembentukan komisi di parlemen, komite penyelidikan ad-hoc, dan biro khusus anti korupsi di bawah departemen kepolisian. Bahkan bentuk institusi ini bisa dilacak lebih jauh lagi di Amerika Serikat. Di sana bisa ditemukan bahwa institusi badan khusus untuk pemberantasan korupsi telah dibentuk di kota New York, pada tahun 1870 an. Sejak itu pula mulai diakui bahwa korupsi lebih dilihat sebagai disfungsi dari administrasi publik dan bukan lagi akibat moralitas seorang.⁵⁹

Luis de Sousa menerangkan kemunculan badan anti korupsi setidaknya diakibatkan oleh dua hal. Pertama, badan ini dibuat sebagai akibat dari menurunnya kekuasaan Eropa di dunia, terutama sekali Inggris. Negara Negara Eropa di Negara Negara koloninya, berusaha untuk membersihkan reputasi buruk para administrator orang-orang Eropa, dan badan anti korupsi dibentuk oleh pemerintahan Negara kolonial, atau pemerintahan yang baru merdeka agar bisa keluar dari perilaku lamanya yang diwarisi dari masa kolonial contohnya seperti *CPIB* di Singapura dan *ICAC* di Hong Kong.

⁵⁹ Paul Meagher, 2005, Anti Corruption Agencies: Rhetoric Versus Reality, *The Journal Of Policy Reform*, Vol. 18, Nomor 1, hlm. 67-103.

Kedua, perkembangan terakhir di akhir abad 20 ialah peran internasional yang menjadi semakin kuat untuk mendorong pembentukan suatu badan anti korupsi di suatu negara. Ada yang berdasarkan konvensi regional dan internasional, ada juga sebagai salah satu paket bantuan rekonstruksi dari donor donor internasional yang biasanya diberikan ke negara negara paika konflik. Contohnya sebagai paket bantuan ialah pembentukan *Anti Corruption Commission* di negara Sierra Leone sebagai bantuan dari USAID dan Pemerintah Inggris.⁶⁰

Jumlah institusi badan anti korupsi ini pun semakin banyak sejak berakhirnya perang dingin. De Sousa melihat dari cakupan lokasi geografisnya meluas dari negara-negara yang berkembang ke negara-negara maju, dan dari masyarakat yang baru mengalami transisi demokrasi hingga negara yang demokratisnya telah terkonsolidasi. Pemicunya bermacam macam, seperti di negara bagian New South Wales, Australia, yang di tahun 1980-an diwarnai oleh skandal-skandal, Sehingga pada tahun 1988 dibentuk *Independent Commission Against Corruption* New South Wales. Negara-negara transisi menuju demokrasi di wilayah Eropa Timur juga diminta membentuk badan anti-korupsi sebagai syarat untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Di Afrika, negara-negaranya diminta untuk membentuk badan anti-korupsi melalui konvensi bernama *The African Union Convention on Combating Corruption*.⁶¹

⁶⁰ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op. Cit., hlm. 34.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 35.

Luis de Sousa mengutarakan bahwa bentuk badan ini masihlah tergolong baru, tetapi jumlah badan anti korupsi meningkat secara drastis. Studi mengenai badan anti-korupsi juga masih minim dibandingkan institusi-institusi pada umumnya. Badan anti-korupsi ini dianggap sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi di berbagai negara, dan misinya hanya berfokus pada satu tujuan besar saja, yaitu pemberantasan korupsi. Badan ini muncul sebagai usaha untuk mengatasi kekurangan dari institusi penegak hukum konvensional dalam menghadapi masalah korupsi yang semakin canggih, dan untuk mendeteksi kasus korupsi yang rumit. Berbeda dengan institusi hukum konvensional seperti kepolisian, badan anti korupsi juga didesain untuk membangun kapasitas sebagai pencegah dan memahami korupsi dengan pendekatan ilmu pengetahuan menggunakan penelitian penelitian terapan.

Badan anti korupsi yang berkembang di berbagai negara saat ini, menurut Sousa, cenderung hanya meniru badan-badan anti korupsi yang sukses saja, atau apa yang Sousa sebut sebagai "*institutional mimetism*". Kepopuleran strategi anti-korupsi dengan membentuk badan anti korupsi memberikan hasil yang berbeda-beda di setiap negara karena setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan terbentuk dari pola pembangunan institusional yang unik. Pemerintah di negara-negara lain yang akan membentuk badan anti-korupsi seringkali angung menduplikasi "model sukses" tanpa memperhatikan dengan cukup terhadap kondisi khusus

konteks institusi dan budaya negara dan badan anti-korupsi yang akan berjalan tersebut..⁶²

D. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Era reformasi Tahun 1998 menandai kondisi politik Indonesia yang baru, dimana presiden Soeharto turun dari posisinya setelah 32 tahun menjabat sebagai presiden. Aturan anti korupsi di masa ini juga berubah. Dari sebelumnya UU Nomor 71 Tentang tindak pidana korupsi, dimasa ini menjadi UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan peralihan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diamanatkan terbentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu dua tahun, sejak undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999.

Ketentuan mengenai KPK dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 belum diatur lebih jauh, selain bahwa keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat, dengan tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidik dan penuntutan. Konsekuensinya adalah perlu disusun segera UU tentang KPK. Selanjutnya, agar KPK dapat menjalankan

⁶² *Ibid.*, hlm. 36.

fungsinya maka harus segera dilakukan seleksi pimpinan dan membangun kelembagaannya. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶³

Tim Khusus atau *steering committee* ini dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor C-45.PR.09.03, tertanggal 2 Juni 2000 yang diketuai oleh Romli Atmasasmita. Menurut Romli Atmasasmita Undang-Undang ini menyertakan ancaman hukum yang lebih besar dan subyek hukumnya tidak lagi perorangan, tetapi bisa pula badan hukum semacam perusahaan, yayasan dan koperasi. Kemudian UU ini direvisi kembali menjadi UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyertakan pembuktian terbalik.

Organisasi bagian institusi anti korupsi di masa ini yang pertama lahir adalah KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dibuat tahun 1999, KPKPN lebih pada strategi untuk mencegah dan monitoring korupsi, karena bertugas untuk memeriksa kekayaan para pejabat publik. Sedangkan untuk represifnya, dibentuk TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) di bawah koordinasi Jaksa Agung dan diketuai oleh Adi Andoyo Sucipto,

⁶³ Arin Swandari, Cisy Satwika, Lilyani Harsulistyati, *KPK Berdiri Untuk Negeri*, Op. Cit., hlm. 126-127.

mantan Ketua Muda Mahkamah Agung. TGPTPK berisi anggota kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait, dan masyarakat. Namun dua institusi ini hanya berjalan sebentar saja. TGPTPK ketika itu mengalami judicial review dan pembentukannya dianggap melanggar UU No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pakar hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa masalah ini akibat dualisme dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu antara Kepolisian dan Kejaksaan. Di satu sisi, UU Nomor 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganatkan Jaksa Agung sebagai koordinator dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Sementara di sisi lain, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan Kepolisian sebagai koordinator penyelidikan dan penyidikan.⁶⁴

Menurut penuturan Kamanto Sunarto, anggota tim *performance review* TGPTPK, keterbatasan dan kendala tersebut dapat dibagi datars tiga lingkup, yaitu kewenangan, kemandirian TGPTPK, serta teristema dari institusi lainnya. Kewenangan TGPTPK mencakup dua hal, yaitu koordinasi penyidikan dan koordinasi penuntutan. Namun dalam hal penyelidikan, Kejaksaan Agung harus memulainya berdasarkan adanya

⁶⁴ Hukum Online, Belajar Dari Kegagalan TGPTPK, Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3295/belajar-dari-kegagalan-tgtpk/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul 12.00 WIB.

laporan warga masyarakat maupun temuan kejaksaaan sendiri dan juga berdasar berkas temuan dari anggota TGPTPK terlebih dahulu.⁶⁵

Gagasan untuk membentuk badan anti korupsi tetu mengemuka pada masa reformasi di akhir tahun 1998 walau ada pro-kontra di masa pemerintahan sebelumnya. Pada bulan Desember tahun 1998, ICAC New South Wales, badan anti-korupsi di negara bagian New South Wales, Austria, mengirim surat ke BPKP. Surat tersebut berusaha memecah keraguan opini kinerja badan anti-korupsi. Berikut pernyataannya:

“The Commission endorses the overall approach of the strategy and the concept of using “entry points to begin the task of reducing corruption in Indonesia. We suggest that the cornerstone of any anti-corruption strategy must be the creation of anti corruption agency”

Terjemahan bebasnya adalah Komisi menyokong semua pendekatan strategi dan konsep menggunakan *“entry points”* untuk memulai tugas mengurangi korupsi di Indonesia. Kami menyarankan bahwa titik penting setiap semua strategi anti korupsi harus dimulai dengan pembuatan badan anti korupsi.”⁶⁶

⁶⁵ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op.Cit., hlm. 124.

⁶⁶ BPKP, Surat ditujukan kepada BPKP (att. Amien Sunaryadi), Nomor Ref. 298/0381 tentang *Review of Indonesia Anti Corruption Strategy* yang ditangani oleh Komisioner ICAC New South Wales, The Hon B S J O’Keefe AM QC, hlm. 226.

Pejabat Departemen Kehakiman Romli Atmasasmita di tahun 1999 juga mulai melakukan penjajakan ke *ICAC* yang ada di HongKong dan tahun-tahun kemudian mulai banyak pejabat publik yang melakukan studi banding terhadap *ICAC* HongKong. Kemudian melalui bantuan dari *Asian Development Bank* dimulailah formulasi mengenai keorganisasian badan anti korupsi untuk pembentukan badan anti-korupsi bernama KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang populer disebut dengan sebutan KPK. Dalam tahap formulasinya mantan ketua badan anti korupsi *ICAC* HongKong, Bertrand de Speville juga dilaporkan pernah ikut serta juga dalam formulasinya. Formulasi UU KPK selesai di tahun 2002.⁶⁷ Namun ada lagi masalah yang menghadang. Presiden Indonesia yang ketika itu adalah Megawati Soekarnoputri justru menunda terlebih dahulu UU KPK ini hingga hampir dua tahun. Megawati baru menandatangani UU KPK ini di akhir bulan Desember 2003.

Alasan penundaan yang dilakukan oleh Megawati tidaklah cukup jelas, tetapi penandatanganan UU KPK terjadi beberapa minggu setelah diratifikasinya Konvensi Anti korupsi dari PBB yang dikenal sebagai *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)*. KPK pada

⁶⁷ Emil. P. Bolongaita, *An Exception To The Rule? Why Indonesia's Anti-Corruption Commission Succeeds Where Other Don't- A Comparison With The Philippines's Ombudsman*, *U4 Issue. Nomor 4*, 2010.

bulan itu secara resmi berdiri dan dipimpin pertama kali oleh Taufiqurachman Ruki (2004-2007), seorang pensiunan dari Kepolisian yang ketika dahulu menyandang pangkat tertingginya Irjen polisi.⁶⁸

2. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;

⁶⁸ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op.Cit., hlm 125.

- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Tinjauan Umum Independent Commission Against Corruption (ICAC)

1. Sejarah Pembentukan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*

Independent Commission Against Corruption (ICAC) HongKong dibentuk berdasarkan *Hongkong Basic Law 1990, Prevention of Bribery Ordinance* atau *POBO (public and private sector). Elections (Corrupt and illegal Conduct) Ordinance, and The ICAC Ordinance*. Ini menjadi rujukan utama dalam diskusi Lahirnya BIAK/BAK (Badan Independen Anti Korupsi/Badan Anti Korupsi). *ICAC* HongKong sudah cukup lama berdiri sejak 15 Februari 1974, Sebelum memiliki lembaga antikorupsi tersebut, HongKong menyerahkan pe-

nanganan kasus-kasus korupsi pada kepolisian. Korupsi kala itu menjadi masalah sosial utama di HongKong yang berkembang sangat pesat, tetapi pemerintah tak berdaya menghadapinya. Pada masa itu petugas kerap meminta uang kutipan atau sering disebut “uang teh”. Sopir ambulans bahkan tidak akan menjemput pasien gawat darurat sebelum diberi uang teh. Korupsi membudaya dan memberatkan rakyat, terutama kelompok yang tak mampu mengakses layanan public. Kesabaran masyarakat makin habis dan mulai melampiaskan kemarahan pada pemerintah yang dianggap tak becus menangani korupsi.⁶⁹

Pada awal 70-an, kekuatan baru masyarakat sipil untuk menekan pemerintah agar menindak para pelaku korupsi bermunculan. Kebencian publik memuncak pada 1973, ketika seorang perwira polisi ekspatriat yang disangka korup melarikan diri dari Hongkong. Inspektur polisi tersebut bernama Peter Fitrozy Godber, dia adalah alasan utama terbentuknya *ICAC*.

Permasalahan dimulai ketika *Anti Corruption Office (ACO)* melakukan penyelidikan terhadap inspektur polisi Godber. Di akhir april 1973, *ACO* menemukan transaksi rutin mencurigakan dari rekening banknya di Kanada karena jumlah transaksi besar yang dilakukannya di luar negeri tersebut. Di bulan Mei, *ACO* mulai memberikan surat perintah kepada hampir 500 bank yang ada di HongKong

⁶⁹ Arin Swandari, Cisy Satwika, Lilyani Harsulistiyati, *KPK Berdiri Untuk Negeri*, Op. Cit., hlm. 46-47.

dan di luar negeri untuk melakukan penyelidikan kepada semua rekening dan pembukuan terkait nama Godber. *ACO* lalu menemukan bahwa uang yang Godber miliki rupanya jauh lebih besar dari gaji yang mungkin Godber bisa peroleh sejak bergabung di kepolisian, yakni dari tahun 1952 hingga 1973.⁷⁰

Sebelum bisa dilakukan penuntutan, dalam aturan anti korupsi HongKong. *ACO* harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kejaksaan. Aturan juga mengharuskan kejaksaan untuk memberitahu tersangka, dan tersangka diberi waktu untuk menjelaskan darimana kekayaan yang diperoleh tersebut. Pemberitahuan dari kejaksaan diberikan pada tanggal 4 Juni 1973, dan memberi jangka waktu satu minggu untuk Godber mempersiapkan presentasi penjelasan mengenai uangnya darimana diperoleh. Di tanggal yang sama, pegawai *ACO* menggeledah rumahnya dan menemukan uang sebesar 4 juta dollar HongKong (sekitar 780 ribu dollar Amerika). Godber tidak dalam pengawasan langsung *ACO*, tetapi keimigrasian di bandar udara ditruksikan untuk menghentikannya bila Godber mau pergi dari HongKong.

Pada tanggal 8 Juni 1973 anehnya Godber bisa pergi dari HongKong melewati kontrol dari keimigrasian. Godber pergi ke Lon-

⁷⁰ Manion, Melanie. *Corruption By Design: Building Clean Government in Mainland China and HongKong*. Cambridge: *Harvard University Press*, 2004, hlm. 32-33.

don, Inggris, bersama kekayaannya. Cerita mengenai korupsi yang dilakukan oleh Godber dan kaburnya ke London menjadi cerita besar media massa HongKong di kemudian hari. Dalam jangka waktu pendek, Godber menjadi simbol korupsi di dalam kepolisian dan lemahnya pemerintah dalam menghadapi korupsi.

Pada bulan Agustus 1973, dua anggota Parlemen Inggris datang langsung ke HongKong Mereka menyampaikan pesan bahwa mereka akan membuat Godber diekstradisi ke HongKong Kemudian mereka juga meminta pihak dari Scotland Yard untuk melakukan intervensi pada kasus ini. Untuk menghadapi demonstrasi ini Gubernur MacLehose membuat komisi penyelidikan yang diketuai oleh Sir Alastair BlairKerr, seorang hakim senior. Pada tanggal 17 Oktober 1973, Gubernur MacLehose mengumumkan di depan *Legislative Council* bahwa dalam waktu cepat akan dibentuk institusi badan anti-korupsi dengan organisasi independen dari Kepolisian untuk mengurus masalah korupsi.

Badan anti korupsi *ICAC (Independent Commission Against Corruption)* akhirnya dibentuk pada bulan Februari tahun 1974 Dipimpin oleh Sir Jack Cater, yang sebelumnya adalah *chief secretary* dan seorang birokrat hasil pendidikan birokrasi HongKong, yakni *Cadet Scheme*. ICAC mempunyai basis untuk menindak korupsi berdasarkan

Prevention of Bribery Ordinance tahun 1971 sebagai salah satu dasar aturannya.⁷¹

2. Tugas Dan Wewenang *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*

Instrumen perundangan di Hongkong yang berhubungan dengan strategi pemberantasan korupsi di Hongkong, adalah:

- a. *The Independent Commission Against Corruption Ordinance;*
- b. *The Prevention of Bribery Ordinance;*
- c. *The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance.*

Tugas *Commissioner* diatur dalam Pasal 12 *Ordinance Chapter* 204, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima dan mempertimbangkan pengaduan terjadinya praktik korupsi dan menyelidiki setiap pengaduan yang dianggap layak;
- b. Penyidikan;
- c. Menyelidiki setiap perbuatan pegawai pemerintah menurut pendapat *Commissioner*, berkaitan atau mendorong praktik korupsi dan melaporkannya kepada *Chief Executive*;

⁷¹ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op.Cit., hlm 61-64.

- d. Memeriksa praktik dan prosedur masing-masing departemen dari pemerintah dan badan hukum, guna mempermudah pengungkapan praktik korupsi serta menjamin revisi metode kerja dan prosedur yang menuntut pendapat *Commissioner* dapat mendorong praktik korupsi;
- e. Menginstruksikan, menasehati, dan mendorong setiap orang atas permintaannya, mengenai bagaimana cara praktik korupsi dapat ditiadakan oleh orang bersangkutan;
- f. Memberi saran kepada departemen dari pemerintah atau badan umum mengenai perubahan dalam praktik dan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dari tugas masing-masing departemen atau badan umum bersangkutan yang dianggap perlu oleh *Commissioner*, guna mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi;
- g. Mendidik publik untuk melawan seluruh aspek jahat korupsi;
- h. Mengumpulkan dan memupuk dukungan publik dalam memerangi korupsi.

Wewenang *Commissioner* dalam *Chapter 201 Part III* (ayat 13-13C, 14, 14A-B, 14D, 14E, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C):

- a. Wewenang istimewa untuk investigasi dengan surat perintah *Commissioner*.

- b. Memerintahkan untuk menyediakan bukti dan memberi bantuan mengkopi dan memotret.
- c. Mengungkap informasi yang didapat pada ayat 13A.
- d. Melarang mengumumkan informasi yang diperoleh.
- e. Wewenang untuk memperoleh informasi akan tetapi, jika seseorang memberi informasi palsu dapat didenda dengan HK \$20.000 dan penjara satu tahun.
- f. Pencabutan undang-undang.
- g. Variasi dan pembatalan pemerintah penahanan.
- h. Memohon petunjuk pengadilan mengenai kapan perkara disidangkan dan siapa jaksa penuntut.
- i. Penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diperluas terhadap pembantu penasihat hukum.
- j. Memohon petunjuk pengadilan mengenai kapan perkara disidangkan dan siapa jaksa penuntut.
- k. Penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diperluas terhadap pembantu penasihat hukum.
- l. Wewenang untuk mendapatkan bantuan dan mengajukan petunjuk kepada pegawai pemerintah. Jika pegawai pemerintah yang dimintai bantuan tidak memberikan bantuan dapat didenda HK \$20.000 dan penjara satu tahun.
- m. Mempunyai wewenang untuk penyelidikan.
- n. Menahan dokumen perjalanan.

- o. Mengembalikan dokumen perjalanan.
- p. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan, penampilan, dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong*

Strategi dalam hal ini berarti pengerahan orang seperti dalam artian “perang”. Terkait masalah korupsi, berarti pengerahan orang dengan tujuan akhir kemenangan dalam mengurangi masalah korupsi.⁷² Dalam studi yang dilakukan oleh tim kerja BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Indonesia, umumnya strategi anti-korupsi bisa di dilihat dari tiga posisi dan sifatnya, yakni preventif, detektif, dan represif.⁷³

Pertama, strategi preventif berada pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran bagaimana upaya mencegah terjadinya korupsi. Strateginya bertujuan untuk meminimalkan penyebab dan peluang korupsi. Kedua, Strategi detektif berada pada posisi perbuatan korupsi sedang terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran bagaimana upaya untuk mengidentifikasi atau mendeteksi korupsi yang terjadi. Strategi ini bertujuan ketika perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat singkatnya dan seakurat-akuratnya agar bisa di tindak lanjuti.

⁷² Peter Schroder, *Strategi Politik*, Trans, Denice Joyce Matindas, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004, hlm. 20.

⁷³ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, 1999, hlm. 38.

Ketiga, strategi represif berada pada posisi setelah perbuatan korupsi telah terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran bagaimana upaya untuk menyelesaikannya secara hukum dengan sebaik-baiknya atas perbuatan korupsi yang sudah diidentifikasi. Strategi ini bertujuan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

1. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia

Baharudin Lopa dalam Muhammad Yusuf menyatakan bahwa, mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tujuan akhir dari pembaruan untuk menanggulangi kejahatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan.

Dalam hal strategi pencegahan korupsi berdasarkan data yang diperoleh⁷⁴ terdapat beberapa indikator strategi pencegahan oleh KPK, diantaranya adalah :

a. Strategi Pencegahan (Preventif) KPK

1) Pendidikan atau Pengenalan Anti-Korupsi Sejak Dini

Menurut Zulkarnanen mantan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan menyatakan lingkungan keluarga atau

⁷⁴ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 46-48.

orang tua memiliki andil dalam pendidikan anti korupsi yaitu dengan cara mengenalkan prinsip dan nilai kejujuran dan kebaikan seperti bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, karena itu pendidikan anti korupsi kita mulai dari hulu.

2) Memasukkan Kurikulum Antikorupsi di Setiap Jenjang Pendidikan

Abraham Samad, mantan Ketua KPK mengatakan, bahwa dengan pendidikan usia dini, diharapkan untuk suatu waktu yang akan datang generasi kita, apabila ditanya tentang korupsi mereka tidak mengerti dan tidak mengenal kata tersebut, hal tersebut akan menjadi petunjuk bahwa pendidikan antikorupsi untuk anak-anak dianggap berhasil. Hal ini Penting karena korupsi ada dan tumbuh seiring laju peradaban manusia. Muncul karena perilaku manusia yang menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan, menyebabkan korupsi susah untuk diberantas dikarenakan manusia dan korupsi adalah dua senyawa yang sulit dipisahkan berasal satu sifat kekal manusia, yaitu keserakahan. Di lain waktu, korupsi bisa berkembang lagi secara dinamis karena korupsi mengikuti pola hidup manusianya yang materialistis.

3) Membangun Budaya Malu/Pribadi Berintegritas

Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling berat di dunia? muridnya ada yang menjawab baja, besi, gajah, beliau menjawab semua itu benar tetapi yang paling berat adalah memegang amanah, banyak manusia masuk keneraka karena gagal memegang amanah, karena amanah adalah sesuatu yang dititipkan, maka pemegang amanah mestinya adalah orang yang dipercaya karena kapasitas dan integritasnya. Pernyataan M. Busro Muqodas, mantan Wakil Ketua KPK bahwa korupsi di Indonesia mengalami regenerasi atau pengkaderan. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah sendiri, bagi bangsa kita untuk memutus generasi korupsi yang tumbuh subur di negara kita.

4) Memerankan Agama (Keimanan) sebagai Kontrol Internal

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU (Nahdathul Ulama) dan Muhamadiyah pernah mengeluarkan fatwa tentang korupsi, hal ini diharapkan dapat mencegah agar umat Islam untuk hati-hati dengan penyakit korupsi tersebut, dan menghindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri dengan tersandungnya presiden/ Terpimpinan Partai Politik Islam "LHI" dalam kasus suap daging sapi, Tersandungnya Mantan Ketua Umum organ-

isasi mahasiswa "AU" dalam kasus hambalang, tersandungnya Ketua Umum partai Politik bersimbol Islam sekaligus Menteri Agama "SDA" dalam kasus dana haji, terungkap-kapnya kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an di Kementerian Agama yang melibatkan tokoh DPRD menjadi deretan panjang sumber yang dapat mengeroposkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada ulama dalam menyampaikan pesan antikorupsi.

5) Menghilangkan Penyebab Korupsi Membangun Sistem Hukum yang Baik

Sulit rasanya menghilangkan korupsi dengan cara memberantas sebagai wujud reaksi simptom yang ada di permukaan masyarakat, korupsi akan terkikis apabila penyebab penyebabnya dihilangkan, sehingga dapat meminimalkan perilaku korupsi. Penyebab penyebab korupsi yang harus di antaranya adalah karena kebutuhan, sistem yang buruk, dan keserakahan.

6) Membangun Sistem Hukum yang Baik

Sistem yang bagus tidak bisa muncul secara tiba-tiba tetapi harus direncanakan untuk dapat mewujudkannya, oleh karena itu sistem hukum yang antikorupsi mengandung tiga komponen, sebagaimana yaitu adanya personel atau birokrasi yang antikorupsi, adanya peraturan peraturan

yang mendukung dalam pencegahan korupsi yang baik untuk masyarakat yang ada, dan adanya budaya anti korupsi yang terbangun dan membudaya. Dengan adanya 3 sub-sistem sebagaimana di atas yang saling berinteraksi saling kait mengkait, maka korupsi tidak akan memiliki tempat untuk tumbuh dan berkembang.

b. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif) KPK

Menurut Artidjo Alkostar seorang hakim dalam setiap putusannya harus memiliki legal reasoning yang baik. Beberapa putusan yang dianggap sebagai setetes air di padang pasir di mata masyarakat dalam mencari keadilan, beberapa perkara yang pernah diputus oleh Artidjo Alkostar, selaku mantan ketua kamar pidana MA, sering menambah jumlah hukuman bagi para terdakwa dengan harapan ada efek jera bagi calon koruptor, di antaranya adalah sebagai berikut: Kasus korlantas dengan Terdakwa Irjen (Pol.) Joko Susilo, Suap Pengadaan Al-Qur'an di Kemenag dengan Terdakwa Zulkamaen, Kasus Hambalang dengan Terdakwa Angelina Sondakh, kasus suap izin impor daging sapi dengan terdakwa Lutfi Hasan Ishak, dan masih banyak lagi.

Menurut M. Busro Muqodas, mantan Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa KPK akan menjadikan tuntutan tambahan, yaitu hukuman (pencabutan hak politik) tersebut sebagai standar

untuk mencegah agar jangan sampai mantan pejabat publik, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang melakukan korupsi tidak dapat mengulangi penyalahgunaan jabatan barunya. Sistem Islam dalam memberantas Korupsi secara sistemik dan terintegrasi yang secara ringkas ditempuh melalui lima langkah, yaitu:

- 1) Penanaman iman dan takwa, dengan itu pejabat dan rakyat akan tercegah melakukan kejahatan termasuk korupsi.
- 2) Sistem pengujian yang layak, sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup.
- 3) Teladan dari pemimpin.
- 4) Pembuktian terbalik. Islam memberikan batasan yang sederhana dan jelas tentang harta *ghulul*. Rasulullah SAW bersabda: *Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian untuknya maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta Ghulul* (HR. Abu Dawud, Ibn Khuzaima dan Hakim).
- 5) Hukuman yang bisa memberikan efek jera, hukuman bisa berupa tasyhir (pewartaan/ekspos), denda, penjara yang lama, bahkan sampai hukuman mati sesuai dengan tingkat dan dampak kejahatannya.

Jamin Ginting mengatakan pemerintah Indonesia sebaiknya memperbanyak perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi guna mengefektifkan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana. Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (*APEC*) yang berlangsung di Tiongkok tidak saja menyepakati hal-hal yang bersifat ekonomi, tetapi juga bersepakat membentuk wadah jejaring kerja sama antara lembaga otoritas antikorupsi dan lembaga penegakan hukum di kawasan yang dinamakan *APEC Network of Anti Corruption Authorities And Law Enforcement Agencies (ACT-NET)*, untuk memberikan bantuan timbal balik, ekstradisi, kerja sama investigasi, dan kemudahan bagi setiap negara korban untuk dapat mengembalikan pelaku tindak pidana korupsi dan aset yang dilarikan di antara negara anggota *APEC*.

Ada tiga tujuan utama yang sangat penting mengapa lembaga (*ACT-NET*) ini dibentuk, yaitu:

- 1) Bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, suap, pencucian uang perdagangan gelap, serta identifikasi dan pengembalian hasil dari seluruh kejahatan itu.
- 2) Berbagi pengalaman, studi kasus, teknik investigasi, cara, dan alat alat melakukan investigasi juga pengetahuan dan

praktik efektif dalam membangun kerja sama pemberantasan korupsi di antara lintas batas negara.

- 3) Menyediakan platform informal bagi kerja sama bilateral dan multilateral dengan memperhatikan ketentuan kebijakan dan aturan hukum nasional negara masing-masing dalam tindak pidana korupsi, suap, pencucian uang, dan perdagangan gelap.

Upaya pemberantasan yang diharapkan membawa sedikit banyak efek jera bagi para calon pelaku, menurut Prof. Dr. Marwan Mas, S.H. sedikit menodai rasa keadilan masyarakat atau terjadi kontra-produktif atas kebijakan Jaksa Agung yang mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. B-113/F/Fd.1.05 tertanggal 18 Mei 2010, yang meminta kejaksan tinggi agar dalam kasus dugaan korupsi, masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang nilainya kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atau berlaku asas *restorative justice*.⁷⁵

Pada tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No-

⁷⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 212.

mor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif tetapi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- 4) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut pasal 8 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- 5) Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini disebabkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembaruan hukum dilakukan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru dengan adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi

Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara.

Penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

c. Struktur Organisasi KPK

Strategi KPK Indonesia tercermin dari struktur organisasinya. Dalam Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Organisasi KPK dibagi menjadi 5 deputi antara lain deputi bidang pencegahan dan monitoring, deputi bidang penindakan,

Melalui lima bidang yang mempunyai tiga tugas yang berbeda KPK menerapkan strateginya dalam pemberantasan korupsi dan memiliki kemiripan dengan *ICAC* Hong Kong. Berdasarkan laporan tahunan KPK, deputi bidang pencegahan mempunyai tugas untuk melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan, sistem, mekanisme kerja pengendalian, dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan serta mengusulkan perbaikannya. Dalam bidang penindakan, KPK mengkoordinasikan dan mensupervisi berbagai institusi negara, baik institusi-institusi penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dan instansi pengawas fungsional pemerintah (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda). KPK kemudian melakukan sendiri penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi berdasarkan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang KPK (KPTPK) dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dari segi kemampuan penindakan secara spesifik terdapat beberapa perbedaan di antara *ICAC* dan KPK dari segi wewenangnya. KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, sedangkan *ICAC* tidak memilikinya, *ICAC* hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Dari sini kekuatan strategi represif KPK cenderung lebih besar dibandingkan *ICAC*.

Secara umum, tugas dan Kewenangan KPK ditetapkan berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 tahun 2019 tentang KPTPK. Koordinasi dengan instansi yang berwenang dapat dilakukan melalui:

- 1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- 4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- 6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Yang Dilakukan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong

Hong Kong mempunyai 3 instrumen perundangan yaitu pertama, *The Independent Commission Against Corruption Ordinance*, membahas secara terperinci mengenai korupsi (*receiving any advantage*), peran-peran atau tugas *ICAC*, prosedur untuk menangani tersangka,

kewenangan untuk menangkap, menahan dan memberikan jaminan, mencari dan menyita, kemampuan mengambil sampel forensik dari seorang tersangka, dan kemampuan menginvestigasi setiap tuduhan korupsi oleh pegawai negeri. Kedua, *The Prevention of Bribery Ordinance*, menjelaskan secara terperinci kategori penyuapan, kewenangan ICAC untuk menelusuri rekening bank, menelaah dokumen bisnis dan pribadi, tersangka yang harus menyatakan pendapatan secara detail, aset-aset dan pengeluaran, kemampuan untuk menahan dokumen perjalanan dan menyegel properti untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dari proses investigasi, serta pemberian perlindungan bagi pelapor (*whistleblowers*). Ketiga *The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance* yang menekankan upaya pencegahan praktik pemilihan yang ilegal dan korup, dan tuduhan spesifik yang melibatkan proses pemilihan umum untuk memilih *Chief Minister*, Dewan Legislatif (*Legislative Council*), Dewan Distrik (*District Council*), serta Kepala, Wakil Kepala atau Komis Eksekutif pada *Rural Committee* dan dewan desa (*Village Representative*).⁷⁶

Pemerintah HongKong sangat mendukung keberadaan ICAC dalam pemberantasan korupsi. ICAC mempunyai 3 strategi utama yang dipandang berhasil dalam memberantas korupsi yaitu: *prevention, investigation dan education*. Ketiga strategi ini mempunyai tujuan yang

⁷⁶ Anita Carolina, Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand, *Jurnal Infestasi*, Volume 8, Nomor 1, 2012, hlm.112

berbeda. Strategi pencegahan (*prevention*), yaitu terdapatnya prosedur atau peraturan yang secara tegas dan detil membahas mengenai definisi dan sanksi korupsi. Strategi kedua, penyelidikan (*investigation*) merupakan penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Strategi *education* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari korupsi.⁷⁷ Jika dibandingkan dengan strategi yang dilakukan oleh ICAC, ditemukan indikator strategi antara lain:

a. Strategi Pencegahan (Preventif) ICAC

ICAC mempunyai tugas untuk mencegah, baik di sektor publik ataupun swasta, serta mengedukasi masyarakat HongKong mengenai masalah korupsi. Tugas pencegahan ini ada di *prevention department*. Untuk pendidikan terdapat di *community relations department*. Tugas *community relations department* menurut Manion ada 4 tujuan pendidikan kepada publik mengenai korupsi oleh departemen ini, antara lain:⁷⁸

- 1) Melakukan propaganda peran ICAC dan membuatnya dapat dipercaya sebagai badan anti-korupsi.

Untuk menjalankan tujuan pertama untuk propaganda "kisah sukses" ICAC dan membuatnya dipercaya sebagai badan anti korupsi dapat dilihat dengan pembentukan unit

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

⁷⁸ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op. Cit., hlm. 80-81.

yang pertama kali dibentuk oleh *community relations department*, yakni *Press Information Office Unit* ini berusaha mengubah persepsi publik dengan propaganda melalui publikasi kepada publik mengenai kesuksesan *ICAC* dalam memberantas korupsi. Unit ini mengeluarkan *press release* ke media masa untuk membuat cerita yang di dramatisir atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *operations department*.

Dengan publikasi yang banyak ke publik, departemen ini berusaha mengubah kepercayaan publik mengenai apa yang bisa dilakukan oleh *ICAC*. Tetapi mereka melakukan setting agenda hanya untuk mengekspos dengan mendramatisir kasus kasus yang berhasil saja dan menutup rapat rapat bila ada kegagalan *ICAC*. Penutupan informasi oleh *ICAC* diatur dalam *Prevention of Bribery Ordinance, sections 30*, di mana proses penyelidikan *ICAC* harus dirahasiakan dan bila ada yang pembuka penyelidikan *ICAC*, misalkan menuliskannya di media massa, maka *ICAC* boleh menuntutnya di pengadilan. Masyarakat HongKong hanya baru diperbolehkan mengetahui hasil penyelidikan korupsi yang ditangani *ICAC* bila tersangkanya sudah dijatuhi vonis oleh hakim. Departemen ini melakukan propaganda menggunakan media komunikasi yang beragam. Mulai dari

poster, talkshow radio, iklan layanan publik di televisi, membuat cerita serial drama di televisi, hingga bekerja sama membuat film layar lebar tentang *ICAC* yang diputar di bioskop.⁷⁹

- 2) Mendidik masyarakat HongKong mengenai konsep korupsi dengan pendekatan hukum atau legal.

Mendidik masyarakat HongKong mengenai konsep korupsi dengan pendekatan hukum atau legal Departemen ini berusaha mendistribusikan aturan anti korupsi dengan media dan bahasa yang sederhana. Ada keganjilan juga pada waktu itu mengenai pemahaman publik mengenai korupsi, karena aturan korupsi yaitu *Prevention of Bribery Ordinance*, justru ditulis dengan bahasa Inggris. Padahal pada waktu itu kebanyakan masyarakat yang ada di HongKong hanya sedikit yang bisa berbahasa Inggris.

ICAC kemudian menyebarkan dua pamflet, yang satu menjelaskan pelanggaran suap kepada pejabat publik, dan satunya lagi menjelaskan pelanggaran suap di sektor swasta. Departemen ini juga membuat program acara singkat televisi yang mendesripsikan hukum anti korupsi yang

⁷⁹ Manion, Melanie. *Corruption By Design: Building Clean Government in Mainland China and HongKong*, Op. Cit., hlm. 44.

berlaku dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.⁸⁰

- 3) Memobilisasi warga negara biasa dan pejabat publik untuk bekerja sama dalam penegakan hukum, agar mau untuk melaporkan ke *ICAC*.

Departemen ini terkait memobilisasi warga negara biasa dan pejabat publik untuk bekerja sama dalam penegakan hukum agar mau melaporkan korupsi ke *ICAC*. Departemen ini banyak bekerja sama dengan *operations department*, Departemen mulai mempublikasikan hotline di mana-mana, baik poster di jalanan hingga di transportasi publik. iklan *ICAC* di televisi pun sengaja di desain untuk menceritakan kasus sukses yang ditangani oleh *ICAC* agar publik bisa percaya terhadap *ICAC*. Kualitas iklan *ICAC* tidak sembarangan, karena iklan *ICAC* di televisi berhasil memenangi beberapa penghargaan iklan televisi terbaik Asia.⁸¹

- 4) Meningkatkan biaya psikologis dan ketidaksetujuan sosial terhadap aktivitas korupsi.

Tugas keempat terkait meningkatkan biaya psikologis dan ketidaksetujuan sosial terhadap aktivitas

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 46.

korupsi. Aktivitas departemen ini lebih banyak dilakukan di sekolah-sekolah tingkat *primary*, *secondary*, dan *tertiary*. Orang-orang muda menjadi prioritas di sini karena departemen ini bertujuan untuk mengurangi korupsi untuk jangka lama. Begitu dua tahun *ICAC* dibentuk, departemen ini membuat *teaching* kiat bagi guru-guru sekolah untuk mengkaji masalah korupsi dan anti korupsi. Dalam memberi *teaching* kiat pun langsung diajari oleh pegawai *ICAC* kepada guru-guru sekolah. Di tahun 1978, departemen ini ikut menyusun kurikulum bagi departemen pendidikan mengenai korupsi tanpa membuat mata pelajaran baru, tetapi dengan memasukkan pesan antikorupsi di tingkat sekolah *tertiary* (setingkat SMA). Di tahun 1995 *ICAC* juga mulai mendorong untuk mengenalkan mata kuliah etika bisnis di tingkat universitas. Menurut Manion, mengajarkan etika bisnis ke tingkat universitas bertujuan agar mencegah serangan kelompok bisnis yang pernah terjadi di tahun 1976.⁸²

Selanjutnya mengenai fungsi dan strategi pencegahan yang dilakukan oleh *prevention department*. Departemen ini melakukan studi terhadap organisasi-organisasi departemen

⁸² *Ibid.*, hlm. 47.

pemerintahan, lalu berusaha memahami prosedur kerjanya untuk melihat peluang korupsi dan sering menyarankan untuk mendesain ulang prosedur yang ada untuk meminimalisasi kesempatan kesempatan korupsi. Alur laporan di *prevention department* diawali dengan presentasi ke *corruption prevention advisory committee*, dan diserahkan ke departemen-departemen pemerintah yang menjadi klien *ICAC*. Analisis pencegahan korupsi *ICAC*, kemudian bertemu dengan departemen pemerintah yang menjadi klien dan berdiskusi untuk mencari kesepakatan untuk mengimplementasikan hasil rekomendasinya. Bila kesepakatan telah terjadi, analis dari *ICAC* lalu datang ke departemen klien untuk memonitor implementasinya dan menilai efektivitasnya apakah signifikan atau tidak.⁸³

b. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif) *ICAC*

Tugas utama *ICAC* untuk melakukan penegakan hukum berada dalam *operations department*. Departemen ini ialah departemen terpenting dalam *ICAC*, karena di sinilah tujuan utama *ICAC* untuk melawan korupsi itu berada. Fungsi-fungsi umum departemen ini sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, hlm. 47.

⁸⁴ *ICAC, Organisation Structure*, diperoleh dari www.icac.org.hk, diakses tanggal 27 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

- 1) Menerima dan mempertimbangkan laporan tanpa bukti tindakan korupsi.
- 2) Menyelidiki dugaan pelanggaran atas tindakan korupsi berdasarkan dua aturan, yaitu *ICAC Ordinance* dan *Prevention of Bribery Ordinance*. Semenjak tahun 2000, bertambah tanggung jawabnya dalam *Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance*.
- 3) Menyelidiki setiap pejabat yang dilaporkan melakukan pemerasan.
- 4) Menyelidiki tindakan setiap pejabat yang terkait dengan tindakan korupsi atau kondusif melakukan korupsi.

Dalam setiap kasus yang ada, pegawai *ICAC* melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak korupsi, tetapi tidak sampai melakukan penuntutan di pengadilan. Tugas penuntutan dilakukan jaksa (*public prosecutor*) yang berada di bawah *Attorney General Office*. Kekuatan sebenarnya *ICAC* berasal dari *Prevention of Bribery Ordinance* tahun 1971. Definisi korupsi dalam aturan ini juga termasuk beberapa aktivitas di sektor swasta atau pejabat bukan dari pemerintah. Tanggung jawab *ICAC* nantinya meningkat di tahun 2000 sejak mulai diadakanya pemilihan umum rutin. *ICAC* berkewenangan untuk mengawasi politik uang melalui *Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance*.

Sehingga mulai tahun itu, bila para politisi berkampanye politik di hadapan publik, maka *ICAC* rutin berkampanye untuk pemilu yang bersih di hadapan publik.⁸⁵

Baru dua tahun berdiri, *ICAC* di akhir tahun 1975 mulai membuat prioritas. *ICAC* telah memiliki lebih dari 400 personil, dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penyelidikan Departemen ini mulai menggunakan strategi baru yaitu strategi proaktif. Fokus *ICAC* di tahun 1976 mulai mengarah ke pola korupsi yang tersindikatis. Ini terlihat di laporan tahunan *ICAC* di tahun 1976 di mana Ketua *ICAC* Jack Cater berusaha berkomitmen membongkar korupsi sindikat terorganisasi dalam waktu satu hingga dua tahun.⁸⁶

Pola korupsi tersindikatis berbeda dengan pola korupsi yang umum seperti penyuapan yang dilakukan oleh individu. Pada pertengahan tahun 1970-an setiap divisi kepolisian setidaknya mempunyai satu sindikat kejahatan dan pola korupsinya telah teratur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa begitu seseorang ikut dalam kesatuan kepolisian, polisi baru itu akan menemukan uang di lokernya secara rutin. Pola sindikat kepolisian ialah untuk melindungi perjudian dan peredaran obat-obatan terlarang. Menjadi Sersan berarti menjadi jutawan karena Sersan lah yang

⁸⁵ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op. Cit., hlm. 68.

⁸⁶ Manion, Melanie. *Corruption By Design: Building Clean Government in Mainland China and HongKong*, Op. Cit., hlm. 40

mengatur distribusi hasil penyuaipan dan menugasi polisi-polisi untuk memeras.⁸⁷

Kondisi ini langsung berubah secara cepat. Di bulan Mei 1976, semua anggota kepolisian di distrik Wanchai telah berada di bawah penyelidikan, ditangkap, dan di interogasi oleh *ICAC*. Di bulan oktober 1977, *ICAC* menangkap 140 polisi dari divisi wilayah kowloon karena keterlibatannya dalam sindikat kejahatan korupsi. Di bulan yang sama, *ICAC* menahan 24 polisi yang 3 di antaranya termasuk inspektur polisi orang Inggris. Dari tahun 1974 hingga 1977, sudah 269 polisi yang dituntut di pengadilan dengan dakwaan korupsi. Kepolisian memprotes tindakan *ICAC* yang terus semakin banyak menangkap para polisi. Ancaman polisi tidak main-main, mereka mengancam untuk tidak lagi menjaga keteraturan sosial. Polisi-polisi yang marah kemudian merusak gedung *ICAC*, melukai 5 pegawai *ICAC*, berdemonstrasi di depan markas kepolisian. dan mulai mengancam di depan rumah Gubernur HongKong.⁸⁸

Amnesti yang diberikan oleh Gubernur langsung merusak kepercayaan publik yang sebelumnya telah dibangun. Menurut Manion, amnesti ini juga rupanya justru malah membantu *ICAC*. Dengan penghentian segala penyelidikan korupsi sebelum tahun

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

⁸⁸ Max. J. Skidmore, promise and peril in combatting corruption: HongKong's *ICAC*, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 547, 1996

1977, maka ini bisa menurunkan beban kerja *operations department*. Amnesti ini membantu para penyelidik *ICAC* untuk berhenti dari penyelidikan kasus-kasus yang panjang, berbiaya mahal dan sulit terkait dengan kejahatan-kejahatan korupsi di masa lalu, dan mengarahkan organisasi ini untuk menfokuskan sumber dayanya kepada pelanggaran yang baru terjadi saja. Amnesti ini juga berdampak pada kinerja kepolisian. Para polisi semenjak itu tidak takut lagi diselidiki oleh *ICAC* atas kejahatan masa lalunya, sehingga para polisi mulai ada kemauan kooperatif untuk membantu para penyelidik *ICAC* dalam penyelidikan korupsi.

Pada tahun 1978 *operations departement* membangun sistem pengawasan dan penyelidikan aktivitas perbankan. Di tahun tersebut juga departemen ini membangun sistem peringatan dini bernama “*external monitoring*”. Sistem ini berusaha untuk mencari dan mendeteksi tanda-tanda munculnya aktivitas korupsi kembali di wilayah yang dulunya praktik korupsi sering terjadi. Selanjutnya, di tahun 1994 *operations department* membentuk tim cepat tanggap bernama *Quick Response Team* untuk menyelesaikan kasus korupsi kecil dengan jaminan respon perkara maksimal 48 jam. Pada tahun 1996 *ICAC* meluaskan yurisdiksinya dengan mengawasi langsung bursa saham

HongKong.⁸⁹ ICAC lalu bekerja sama dengan bermacam-macam departemen pemerintahan hingga *non-department public bodies* terutama *regulatory bodies* semacam *Securities and Futures Commission* dan HongKong *Monetary Authority*.

Menurut ilmuwan sosial bernama Skidmore ketika menanyakan pandangan masyarakat HongKong terhadap ICAC. Dari beberapa orang yang ditanyai, terdapat perspektif lain terhadap ICAC HongKong di mata masyarakat HongKong. Masyarakat HongKong bukan takut pada perilaku korupsi, tapi justru ketakutan terhadap ICAC, Skidmore mengutarakannya sebagai berikut.

"They're afraid of ICAC-afraid not to be supportive. The agency's reputed tactics certainly contribute to any fear that exists. Those whom ICAC has taken in for questioning say that a usual practice is to knock on the door at 4 a.m, achieving maximum intimidation when people are unprepared. They're tough boys.

(Mereka takut ICAC bukan akan tidak mau membantu. Badan ini mempunyai reputasi taktik yang menakutkan, Bagi setiap pihak yang ICAC tanyai akan mengatakan bahwa praktik biasanya adalah dengan mengetuk pintu jam 4 pagi,

⁸⁹ Lo Shiu-Hing, Anti-Corruption and Crime, dalam *The Other HongKong Report 1996*, ed. Nyaw Mee-kau dan Li Si-ming, HongKong: Chinese HongKong University, 1996, hlm.160.

kondisi di mana mereka bisa mengintimidasi secara maksimal ketika orang-orang masih belum siap. Mereka tangguh).

Dari sini tampak bahwa orang-orang Hong Kong tampak takut justru bukan karena perilaku korupsinya, tetapi oleh ICAC itu sendiri.

c. Struktur Organisasi *ICAC*



Gambar 3.2 Struktur Organisasi *ICAC*

Strategi pemberantasan korupsi *ICAC* tercermin dari struktur keorganisasiannya. Dalam organisasi *ICAC* dibagi menjadi tiga departemen yaitu *operations department*, *corruption prevention department*, dan *community relations department*.

Melalui tiga departemen ini, *ICAC* merencanakan dan mengimplementasikan strateginya dalam menghadapi korupsi. *Operations Department* mempunyai tugas melakukan penegakan

hukum melalui penyelidikan dan penyidikan. Tujuan departemen ini ialah untuk membuat tindakan korupsi sebagai perbuatan kriminal berisiko tinggi. *Corruption Prevention Department* melakukan pencegahan sebelum terjadinya korupsi. Tujuan departemen ini ialah untuk membuat tindakan dan peluang korupsi yang ada lebih sulit. *Community Relations Department* sebagai bagian strategi dari pencegahan, tugasnya melakukan pendidikan dan propaganda mengenai citra ICAC. Tujuan departemen ini adalah menciptakan dan mempertahankan suasana kondisi sosial dan opini publik di masyarakat agar terus “mengutuk” perbuatan korupsi dan menjaga citra ICAC.⁹⁰

Beberapa pengamat melihat bahwa kekuasaan ICAC sangat besar dan seringkali kekuasaan yang dimilikinya dijuluki sebagai “*draconian power*”. Disebut seperti itu karena mempunyai kekuasaan melebihi kekuasaan kepolisian pada saat itu, seperti pegawai ICAC bisa menahan seseorang tanpa surat perintah pengadilan dengan batas waktu hingga 3 jam, menahan paspor seseorang yang terduga korupsi hingga 9 bulan dengan izin pengadilan walaupun kasus terhadapnya belum dimulai, dan memeriksa rekening bank terduga korupsi. ICAC bahkan bisa

⁹⁰ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Op. Cit., hlm. 66-67.

mempunyai kekuasaan untuk melarang media massa untuk menutup identitas terduga korupsi sebelum adanya vonis hakim terhadap terduga tersebut. Kekuasaan yang paling kontroversial yang dimiliki oleh *ICAC* ialah menahan tanpa bukti bagi pejabat publik yang mempertahankan standar hidup di luar kemungkinan kemampuan mereka sebagai pejabat publik.⁹¹

B. Persamaan Dan Perbedaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong

Dari pemaparan sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa analisa perbandingan yakni sebagai berikut:

1. Check & Balance *ICAC* HongKong dengan KPK⁹²

Tabel 3.1 Check & Balance *ICAC* HongKong dengan KPK

Pengawasan	ICAC	KPK UU lama	KPK UU baru
Legislatif	Dewan Legislatif	DPR	DPR

⁹¹ T.Wing Lo dan Ricky C.C. Yu, Curbing Draconians Powers: The Effects On Hong Kong's Graft-Fighter, *The International Journal of Human Rights*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 55-56.

⁹² Arif Gunawan, *Revisi UU Bikin KPK Sekeren ICAC Hong Kong? Lha Serius?*, Dikutip dari CNBC Indonesia, www.cnbcIndonesia.com, 2019, Diakses Pada 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

Eksekutif	Kepala Eksekutif	Presiden RI	Presiden RI
Internal	L Group	Direktorat Pengawasan Internal	Inspektorat KPK
Eksternal	Komite Penasihat	Komite Etik	Dewan Pengawas
Publik	Komite Aduan	Deputi Pengaduan Masyarakat	Direktorat Pelayanan Laporan Dan Pengaduan Masyarakat
Media	Jurnalis	Jurnalis	Jurnalis

Dari situ terlihat bahwa pada dasarnya mekanisme check and balance KPK sudah sama dengan *ICAC*. Bedanya, *ICAC* tidak memiliki wewenang penuntutan (yang saat ini dimiliki oleh KPK). Perubahan mendasar revisi UU KPK dalam struktur check and balance terletak pada keberadaan Dewan Pengawas, yang menggantikan Komite Etik. KPK pernah membentuk Komite Etik yang berisi gabungan unsur internal dan eksternal. Di *ICAC* juga ada lembaga semacam dewan

pengawas, yakni Komite Penasihat berisikan masyarakat sipil (eksternal). Namun, Dewan Pengawas di KPK yang baru memiliki fungsi dan kewenangan lebih besar dari Komite Penasihat *ICAC*.

a. Tugas Dewan Pengawas KPK⁹³

- 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
- 2) memberikan izin atau tidak;
- 3) Memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- 4) Menyusun dan menetapkan kode etik;
- 5) Menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik atau ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 6) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan
- 7) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala.

b. Tugas Komite Pengawas *ICAC*⁹⁴

- 1) Untuk memberi nasihat kepada Komisaris Komisi Independen Anti Korupsi tentang segala aspek masalah korupsi di Hong Kong;

⁹³ KPK, Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Tahun 2020, *Bahan Siaran Pers*, 2020, hlm. 1.

⁹⁴ Dikutip dari website <https://www.icac.org.hk>, Advisory Committee on Corruption, diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB

- 2) Menjaga agar kebijakan operasional, kepegawaian dan administrasi Komisi ditinjau;
- 3) Memberi nasihat atas tindakan yang sedang dipertimbangkan oleh Komisaris berdasarkan pasal 8 (2) dari *Independent Commission Against Corruption Ordinance*;
- 4) Menerima laporan dari Komisaris tentang tindakan disipliner yang diambil;
- 5) Memertimbangkan perkiraan tahunan pengeluaran Komisi;
- 6) Meneliti laporan tahunan Komisi sebelum diserahkan kepada Kepala Eksekutif;
- 7) Mengirimkan laporan tahunan kepada Kepala Eksekutif tentang pekerjaan Komite;
- 8) Untuk menarik perhatian Kepala Eksekutif, jika dianggap perlu, segala aspek pekerjaan Komisi atau masalah apa pun yang dihadapi Komisi.

Selain diawasi oleh pengawas eksternal, dua lembaga tersebut juga memiliki pengawas internal yaitu L Group dimiliki oleh ICAC dan Inpektorat dimiliki oleh KPK.

- a. Tugas L Group sebagai Lembaga Pengawas Internal ICAC ⁹⁵

⁹⁵ Dikutip dari website <https://www.icac.org.hk>., Checks and Balances, Internal Monitoring, diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB

Unit investigasi dan pemantauan internal, L Group, bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran disiplin staf, dugaan korupsi terhadap staf *ICAC* dan pengaduan non-kriminal terhadap *ICAC* atau stafnya. Semua tuduhan korupsi dan tindak pidana terkait terhadap staf *ICAC* menjadi perhatian Sekretaris Kehakiman, yang kemudian akan memutuskan apakah mereka harus diselidiki oleh *ICAC* atau lembaga penegak hukum lainnya. Semua investigasi yang diselesaikan dilaporkan kepada Sekretaris Kehakiman dan Komite Peninjau Operasi (*Operations Review Committee*).

b. Tugas Inspektorat Pengawas Internal KPK⁹⁶

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis/prosedur operasi baku dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas Inspektorat;

⁹⁶ Dikutip dari website [https:// www.kpk.go.id](https://www.kpk.go.id)., Inspektorat, diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 10.40 WIB

- 2) Pelaksanaan pengawasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pemberantasan korupsi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi pemantauan kegiatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem informasi dan proses tata kelola pada Komisi;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja melalui pelaksanaan reviu keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6) Pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin melalui penelaahan pengaduan, pencarian dan pengumpulan bukti-bukti, serta penyelidikan atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan insan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait sehubungan dengan fungsi pengawasan internal;
- 8) Melakukan eksaminasi atas putusan pengadilan untuk kepentingan penerapan dan teori hukum;

- 9) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

Dalam hal pengaduan tindak pidana korupsi oleh masyarakat, pada dua lembaga tersebut memiliki pelayanan pengaduan yaitu:

- a. Komite Aduan (*ICAC Complaints Committee*)

Komite Pengaduan *ICAC* memantau dan meninjau semua pengaduan non-kriminal terhadap *ICAC* atau stafnya. Komite tersebut terdiri dari anggota Dewan Legislatif dan anggota masyarakat terkemuka yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif.

- b. Direktorat Pelayanan Laporan Dan Pengaduan Masyarakat

Direktorat ini dibawah naungan Deputy Bidang informasi dan Data, yang salah satu fungsinya adalah Pelaksanaan pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat.

2. KPK Indonesia dan *ICAC* HongKong

- a. Perbedaan KPK dan *ICAC*

Tabel 3.2 Perbedaan KPK dan ICAC

Perbandingan	KPK	ICAC
Perbedaan		
Pembentukan	29 Desember 2003	14 Februari 1974 Berdiri lebih dahulu
Alasan Pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia menandatangani konvensi PBB yaitu UNCAC (United Nations Convention against Corruption) pada 18 Desember 2003 - Lembaga anti korupsi hadir atas dasar dari dalam bangsa sendiri, karena semangat reformasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dijadikan koloni oleh Inggris (imperialisme) - Lembaga anti korupsi adalah salah satu warisan pemerintah koloni Inggris
Peringkat	102 negara dalam <i>Corruption Perceptions Index</i>	11 negara dalam <i>Corruption Perceptions Index</i>

	dari <i>Transparency National</i>	dari <i>Transparency National</i>
Peraturan perundang-undangan yang mengatur	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Independent Commission Against Corruption Ordinance chapter 204.</i> - <i>The Prevention of Bribery Ordinance</i> - <i>The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance</i>
Struktur	Organisasi KPK dibagi menjadi 5 deputi antara lain deputi bidang	Organisasi ICAC dibagi menjadi tiga departemen yaitu

	<p>pencegahan dan monitoring, deputi bidang penindakan, deputi bidang informasi dan data, deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, deputi bidang koordinasi dan supervisi.</p> <p>(struktur organisasi KPK lebih banyak)</p>	<p><i>operations department, corruption prevention department, dan community relations department.</i></p> <p>(struktur organisasi lebih sedikit tetapi lebih fleksibel)</p>
Strategi pencegahan	<p>- Strategi pencegahan (Preventif) KPK dengan konsep keagamaan (religius), penanaman moral, tidak langsung dengan pendekatan hukum.</p>	<p>- Strategi Pencegahan (Preventif) Mendidik masyarakat HongKong mengenai konsep korupsi dengan pendekatan hukum atau legal.</p> <p>- Strategi preventif melalui pendidikan di seluruh jenjang pendidikan tanpa</p>

	- Strategi preventif melalui pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dan memasukan nya ke dalam kurikulum.	memasukan nya ke dalam kurikulum.
Strategi pemberantasan	Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (strategi represif KPK cenderung lebih besar)	Hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak melakukan penuntutan

b. Persamaan KPK dan ICAC

Tabel 3.3 Persamaan KPK dan ICAC

Perbandingan	KPK	ICAC
Persamaan		

Tujuan	Membangun lembaga anti korupsi sebagai refleksi lepas dari rezim otoriter/pemerintah kolonial
Strategi Pencegahan dan Pemberantasan	Menggunakan model strategi yang sama dalam mengatasi korupsi (penindakan/operation, detektif/respresif, pencegahan/preventif)

Dilihat dari tabel di atas bahwa KPK dan *ICAC* mempunyai perbedaan dan persamaan. Model strategi antara KPK dan *ICAC* menggunakan model strategi yang sama yaitu dalam mengatasi korupsi (penindakan/operation, detektif/respresif, pencegahan/preventif). Strategi KPK Indonesia juga tercermin dari struktur organisasinya. Dimana dalam organisasi KPK terdapat lima deputi bidang yang bisa dibagi kedalam dua bidang utama yakni bidang penindakan dan pencegahan. Selain itu, ada bidang lain yang bertugas sebagai infrastruktur organisasi, yakni bidang informasi dan data, dan sekretariat jendral. Akan tetapi, peniruan secara sistematis sebuah strategi tidak selalu mendatangkan hasil yang sama. Hal ini dapat kita analisa melalui KPK yang menggunakan strategi anti korupsi yang sama, namun membawa pada hasil yang berbeda.

C. Pembaharuan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Perubahan Undang-Undang pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*

Pada tanggal 19 – 20 Maret 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Seminar: Urgensi Pembaruan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seminar diselenggarakan sehubungan dengan ratifikasi *UNCAC* oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (*UNCAC*). UU tersebut mengharuskan Indonesia untuk mematuhi standar *UNCAC*. Undang-undang Anti-Korupsi saat ini dibentuk pada tahun 1999 dan diubah pada tahun 2001, sebelum diberlakukannya *UNCAC*. Oleh karena itu, beberapa ketentuan yang diamanatkan oleh *UNCAC* tidak diadopsi dalam Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia saat ini.

Karenanya, berdasarkan tinjauan implementasi *UNCAC*, Indonesia perlu meningkatkan undang-undang antikorupsi dan mengadopsi 4 jenis korupsi sebagai tindak lanjut, yaitu :⁹⁷

⁹⁷ Berita KPK, Urgensi Pembaruan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, www.kpk.go.id., diakses tanggal 27 Maret 2021, Pukul 13.00 WIB.

- a. Perdagangan pengaruh (*trading in influence*).
- b. Memperkaya diri secara ilegal (*illicit enrichment*).
- c. Penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*)
- d. Penyuapan asing (*foreign bribery*).

Ketentuan ini dapat meningkatkan kapasitas negara pihak untuk mengendalikan dan mencegah korupsi. Berikut penjelasannya:

- 1) Perdagangan pengaruh (*trading in influence*).⁹⁸

Negara Indonesia yang telah mengesahkan Konvensi Anti Korupsi yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation Covention Against Corruption (UNCAC)* dengan Undang-undang No 7 tahun 2006. Pasal 18 UN-CAC menyatakan Negara pihak termasuk Indonesia wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, (*UNCAC*) berbunyi :

- Pasal 18 (a)

The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State

⁹⁸ Artidjo Alkostar, Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, *Materi Seminar Pembaharuan UU KPK*, 2019, hlm. 40-42.

Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;

(Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik untuk kepentingan orang yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain);

- Pasal 18 (b)

The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.

(Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu

keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang ada padanya atau dianggap ada dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik.)

Dari pasal 18 UNCAC tersebut terlihat adanya dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan transaksional yang tidak sah atau tidak patut yang berakibat merugikan publik, masyarakat, rakyat, atau negara. Postulat moral keberadaan ketentuan tersebut adalah larangan keberadaan praktek perdagangan kewenangan atau pengaruh yang sejatinya milik publik, lalu dialihkan menjadi milik individual dan diperdagangkan di pasar gelap. Praktek suap untuk izin pertambangan, reklamasi, pembangunan gedung, kolusi dalam pembuatan peraturan atau undang-undang yang marak dewasa ini, merupakan tipologi perbuatan memperdagangkan pengaruh.

Transaksi jual beli pengaruh selalu melibatkan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Untuk itu, penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki seperti perdagangan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, didasarkan atas premis sifat berbahaya perbuatan yang dapat menimbulkan oligarki dan dinasti

politik serta munculnya kemiskinan struktural yaitu sistem hubungan sosial ekonomi yang tidak adil karena yang miskin tetap atau tambah miskin sedang yang kaya tambah kaya. Kesenjangan sosial berupa jurang perbedaan antara kelompok kaya dibanding golongan miskin secara perlahan membuat rapuh bangunan sosial ketahanan negara.

Di dalam masyarakat Indonesia saat ini ada area kelabu antara kewenangan publik dan motif untuk kepentingan individual dari pejabat publik. Praktek keberadaan perdagangan pengaruh tidak dikehendaki oleh masyarakat beradab, karena keberadaan perbuatan tersebut merusak tatanan moral dan menghancurkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya perbuatan memperdagangkan pengaruh dan memperkaya diri secara tidak sah selalu menimbulkan ironi demokrasi berupa kesenjangan sosial ekonomi yang merusak kohesi sosial persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Sebagaimana dijelaskan dalam *UNCAC*, bahwa “Pejabat Publik” adalah :

- a. Setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif/administratif atau yudikatif , baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik dibayar atau tidak dibayar, tanpa memperhatikan kesenioritasan orang tersebut;

- b. Setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk instansi publik atau perusahaan publik, atau yang memberikan pelayanan umum;
- c. Setiap orang yang didefinisikan sebagai “Pejabat Publik” dalam perundang-undangan Negara Pihak. (Pejabat publik dapat berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan pelayanan umum).

Perbuatan ilegal memperdagangkan pengaruh (dalam *UN-CAC*) ini bertali-temali dengan tindakan asosial lainnya yaitu memperkaya diri secara tidak sah (pasal 20), penyuapan di sektor swasta (pasal 21), penggelapan kekayaan di sektor swasta (pasal 22) yang membahayakan negara. Hal ini menuntut adanya pengaturan hukum yang tegas supaya tubuh negara kesatuan RI tidak mengidap penyakit kanker korupsi yang kronis dan menjaga kekayaan negara agar tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak bermental korup. Revolusi mental yang digulirkan pemerintahan saat ini harus di realisasikan dalam bentuk perangkat hukum yang berspirit kerakyatan. Instrumen hukum yang berdaulat akan berdampak bagi iklim sosial ekonomi yang kondusif dan memberi payung hukum bagi dunia usaha yang sehat, sehingga pelaku usaha tidak berada dalam suasana rentan suap dan pemerasan. Pe-

nanaman modal dan habitat perdagangan yang prospektif menyuburkan pertumbuhan ekonomi harus terjamin dengan adanya penegakan hukum yang berintegritas, bukan karena ada koneksi kolusif dengan penyelenggara negara yang memperdagangkan pengaruh atau menyalahgunakan kewenangan.

2) Memperkaya diri secara ilegal (*illicit enrichment*).⁹⁹

Konsekuensi logis dari pasal 20 Kovensi PBB tentang Anti Korupsi maka negara Indonesia wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi memberlakukan larangan memperkaya diri secara tidak sah yaitu adanya peningkatan secara signifikan dalam aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar dan masuk akal berkaitan dengan penghasilannya. Apalagi, ada data bahwa 6000 WNI menyimpan dana di luar negeri. Hal ini menunjukkan betapa banyak orang Indonesia mengabaikan nasionalisme ekonomi dan nasib rakyat lemah serta lebih mementingkan penumpukan harta pribadi. Untuk itu fungsi protektif hukum pidana korupsi harus direalisasikan dalam praktek pendistribusian ekonomi yang adil dan penegakan kedaulatan hukum nasional, salah satunya adalah pengembalian kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh koruptor harus dikembalikan kepada rakyat yang masih berada dalam kemiskinan.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 42

Seperti diberitakan berbagai media bahwa data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang. Banyak rakyat miskin di satu pihak dan di pihak lain trilyunan uang negara Indonesia dikorupsi oleh koruptor merupakan ironi bagi negara yang berideologi keadilan sosial dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Negara dan rakyat Indonesia saat ini sedang berperang melawan korupsi politik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan politik elektoral dan korupsi vertikal yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang mempergunakan instrumen kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada dirinya.

Penegakan hukum Indonesia harus secara efektif dapat memberi sanksi korporasi yang melanggar hukum Indonesia. Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Hingga saat ini penyidik dan penuntut umum di Indonesia masih gampang untuk menyeret korporasi ke meja hijau, sehingga kejahatan korporasi yang melakukan korupsi atau berkolusi dengan pejabat yang memperdagangkan pengaruh tidak tersentuh oleh sanksi hukum. Korporasi saat ini banyak dijadikan instrumen melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, pencurian ikan, pembalakan hutan, perusakan lingkungan hidup,

menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak yang banyak merugikan negara Indonesia.

Hingga saat ini negara Indonesia masih termasuk kelompok negara terkorup di dunia. Sebagai contoh tahun 2020 IPK Indonesia hanya berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara, ternyata predikat negara Indonesia sebagai negara korup masih memprihatinkan. Predikat negara Indonesia berada dalam kelompok negara yang kejahatan korupsinya terjadi secara sistemik dan meluas membuat orang Indonesia menjadi malu dalam konferensi tentang korupsi di forum internasional. Untuk itu perlu dibangun kesadaran kolektif bangsa untuk tidak korupsi. Membangun sikap mental yang berada dalam perangkat lunak (software) alam batin, menuntut komitmen nyata dan keteladanan pemimpin, pejabat tinggi, penyelenggara negara, wakil rakyat, publik figur untuk proaktif bersikap toleransi nol terhadap korupsi.

Perbuatan para koruptor yang memperkaya diri secara tidak sah yang berdampak pada kualitas daya saing sumberdaya manusia Indonesia mempunyai hubungan kausal dengan kewibawaan negara dan martabat bangsa Indonesia. Korupsi dengan berbagai turunannya seperti suap, kolusi, pemerasan halus mempergunakan kewenangan sebagai pejabat akan menurunkan potensi kemampuan kompetisi bangsa Indonesia bersaing dengan

negara lain. Etos bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang harus selalu direvitalisasi melalui kerja keras tanpa korupsi. Negara Indonesia harus mengambil pelajaran dari pengalaman pahit praktek korupsi era orde baru yang memunculkan ketidakadilan sistemik dan mengakibatkan krisis ekonomi politik dan berujung gerakan reformasi.

Konsekuensi logis dari orang yang berpredikat pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku dan hasil perbuatannya kepada publik. Pejabat publik memiliki fasilitas dan kewenangan yang diamanatkan oleh rakyat. Konsekuensi yuridisnya, pejabat publik yang memperdagangkan pengaruh dan memperkaya diri secara tidak sah harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang asosial secara hukum. Kewibawaan wajah negara Indonesia di mata internasional dan nasional perlu terus dijaga dengan menghidupkan fungsi protektif hukum pidana. Hukum yang adil dan berdaulat sejatinya dapat membangun optimisme masa depan negara. Revitalisasi hukum pidana dan peningkatan profesionalisme penegak hukum pidana yang berkelanjutan merupakan keniscayaan. Penegakan hukum pidana yang berintegritas merupakan salah satu komponen ketahanan negara demokrasi Indonesia.

- 3) Penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*) dan penyuapan asing (*foreign bribery*).

Suap di sektor swasta dan suap asing adalah ketentuan untuk mengatasi masalah korupsi di sektor swasta. Suap di sektor swasta memperkenalkan suap aktif dan pasif di sektor swasta. Sedangkan, suap asing melarang suap aktif yang berlaku untuk pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, bukan pejabat publik nasional.

Keempat jenis korupsi di atas adalah hal baru bagi Indonesia dan tidak pernah dianggap sebagai kejahatan sebelumnya. Diskusi dan debat yang intensif tentang keempat ketentuan ini penting, terutama tentang bagaimana penyusunan hukum dari ketentuan ini harus diambil dan bagaimana menegakkan ketentuan ini di Indonesia. Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak hanya memperbaiki kekurangan yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, seperti mengadopsi semua ketentuan yang disyaratkan *UNCAC*, mendefinisikan kembali kerugian negara, memperluas jenis instrumen hukuman, dan memberikan prosedur yang jelas untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi kerusakan yang terjadi dari korupsi, tetapi juga memperkuat kerangka kelembagaan KPK dengan

menekankan otoritas KPK sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelidiki dan menuntut korupsi.

2. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Entitas keberadaan hukum tidak lepas dari nilai etis, nilai logis, nilai estetis, karena hukum atau undang-undang bukan peti kemas yang kosong (*empty container*) dan sejatinya undang-undang bersukma keadilan dan berspirit kerakyatan. Hukum senantiasa bergerak sentrifugal ke arah perkembangan politik, ekonomi, budaya, serta bergerak secara sentripetal ke arah nilai logis (kebenaran), nilai etis (keadilan) dan nilai estetis (harmoni sosial). Dengan demikian, keberadaan hukum akan dapat memberikan perlindungan atau fungsi protektif bagi martabat kemanusiaan.

Dalam praktek penerapan hukum, akan selalu terlibat faktor-faktor substansi hukum, hukum acara, partisipasi masyarakat, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya, aparat penegak hukumnya. Sehingga untuk sampai pada tujuannya yaitu kebenaran dan keadilan, penegakan hukum, dituntut untuk selalu menjaga dan mengevaluasi agar faktor-faktor yang terlibat tersebut berperan secara positif.

a. Independensi KPK¹⁰⁰

Dalam dasar pertimbangan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2002 dengan jelas disebutkan bahwa pemberantasan tindak

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

pidana korupsi ditingkatkan secara professional. Karena sebelum adanya UU No. 30 Tahun 2002 atau sebelum adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dilaksanakan secara professional. Hal ini menjadi tantangan dan kewajiban moral, bagi institusi dan orang-orang yang ada di lembaga KPK untuk memenuhi standar profesionalisme, yaitu memiliki *knowledge*, *skill legal technical capacity*, dan *moral integrity*. Dalam perspektif profesionalisme secara umum, tiga komponen tersebut paling tidak dikuasai, sedangkan untuk KPK yang menyanggah harapan publik nasional maupun internasional, maka tiga komponen profesionalisme tersebut harus terisi secara optimal, di atas rata-rata dan unggul.

Adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah karena lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi tidak (belum) berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini juga harus dijawab oleh lembaga KPK dan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di mata rakyat Indonesia dan masyarakat internasional berjalan secara efektif dan efisien. Jawaban positif tersebut, akan memenuhi kehendak pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang relevansi sosial politik dan yuridis perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Independen.

Independensi KPK sebagai lembaga negara merupakan “Mahkota” bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini juga harus dijaga oleh orang-orang KPK sendiri, institusi dan orang-orang di luar KPK yang memiliki kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Dalam praktek penegakan hukum, sering terjadi godaan kekuatan ekonomi dan tantangan pengaruh kekuasaan politik, atau godaan “romantisme” perkawanan, senioritas, ketokohan, pemuka agama, dan lain sejenisnya. Dengan demikian, adanya pengaruh dari hal-hal tersebut.

- b. KPK Sebagai Organ Konstitusional Yang Diatur Dalam UUD 1945.

Keadilan sejatinya merupakan perekat kohesi sosial dan menjadi elemen determinan dalam proses pembangunan yang inklusif. Kesaksian sejarah menunjukkan bahwa di mana terjadi kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi politik yang berkualifikasi *extra ordinary crimes* maka akan terjadi revolusi sosial. Hal ini telah ditunjukkan dalam kerajaan Mesir Kuno, Babilonia, Kerajaan di Cina, India, Yunani Romawi, Dinasti Abbasiyah, Presiden Marcos, dan sejenisnya. Fenomena ini telah menjadi hukum alam atau Sunnatullah. Dengan demikian wacana memasukkan KPK sebagai organ konstitusional yang diatur dalam

ranah KOSMOS atau UUD 1945 berkorelasi dengan momentum sebagaimana yang terjadi pada lembaga yang lahir pada momentum reformasi dan peralihan dari Orde Baru ke era reformasi. Dengan catatan tambahan tentang nama yang permanen sesuai dengan kaidah lembaga hukum di dunia internasional. Karena hal ini terkait dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang menyangkut hakim ad hoc.¹⁰¹

Banyaknya dukungan masyarakat terhadap langkah hukum KPK merupakan konsekuensi etis dari posisi sosial dan memikul tanggungjawab harapan masyarakat terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Banyak warga masyarakat berpendapat bahwa orang-orang KPK adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga tidak akan mempergunakan posisi sebagai orang KPK untuk kepentingan politik, ekonomi, dan popularitas sesaat.

Kejujuran merupakan akhlak yang terpuji yang menunjukkan kebenaran. Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan kepercayaan, cinta dan kehormatan. Orang yang jujur tidak akan takut dan galau dalam berinteraksi dengan berbagai masalah dalam pergaulan sosial, karena berada dalam suasana hati mantap dan merasa terlindungi oleh Yang Maha Tahu dan Maha Adil.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 4.

Kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan. Kejujuran termanifestasikan dalam kegembiraan bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Kejujuran akan menjadi nutrisi bathin, karena hati menjadi sehat dan bening serta tidak terkontaminasi oleh kebohongan, keculasan dan hal-hal yang bersifat manipulatif. Sejatinya manusia dianugerahi hati nurani oleh Yang Maha Pencipta, sehingga seharusnya tidak berdusta. Integritas berkorelasi dengan tersedianya energi dari dalam dan pola (*template*) atau prinsip yang membentuk arah pertumbuhan. Integritas memiliki dimensi kejujuran, moralitas, tanggungjawab, satu kata dengan perbuatan, konsisten terhadap kaidah kesuksesan.

Di dalam masyarakat banyak terjadi area kelabu antara kewenangan publik dan motif untuk kepentingan individual dari pejabat publik. Perbuatan yang berada di area kelabu tidak memiliki kebaikan, kebenaran, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Untuk itu, orang yang berintegritas akan dapat memisahkan antara jabatan yang disandangnya sebagai artefak dengan pribadinya yang otentik. Sikap berintegritas ini sejatinya menular dan menjadi kesadaran kolektif dalam budaya institusi.

Integritas berkorelasi dengan pilihan nilai atau ideologi yang dianut oleh seseorang yang diyakini sebagai kepantasan. Pilihan nilai tersebut menjadi merek diri atau branding serta citra

yang terpancarkan kepada orang lain. Pilihan nilai tersebut merupakan akumulasi kebiasaan, keterampilan, pengalaman, kemampuan dan nilai-nilai yang dianut. Pancaran citra yang secara kontinyu dan konsisten dibiasakan dengan sadar dan berkelanjutan menjadi identitas diri dari orang tersebut.

3. Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan UU KPK¹⁰²

Pasca perubahan Undang-undang KPK, terdapat beberapa hal yang prinsip terkait arah pemberantasan korupsi ke depannya. Selanjutnya penulis membagi dalam 3 kategori yakni tentang status dan kedudukan organisasi, penanganan kasus, serta tugas dan kewenangan KPK.

a. Status dan Kedudukan Organisasi KPK

- 1) KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- 2) KPK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

¹⁰² Edita Elda, Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm. 166-168.

- 3) Menghilangkan ketentuan KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.
- 4) Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil Negara.
- 5) Jika penyelidik, penyidik dan pegawai KPK belum bertatus sebagai ASN, maka dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pimpinan KPK berusia minimal 50 tahun, maksimal 65 tahun pada proses pemilihan.
- 7) Penambahan pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela.
- 8) Tidak ada lagi tim penasehat KPK.
- 9) Adanya penambahan Dewan Pengawas dalam komposisi KPK dan berusia 55 tahun
- 10) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK periode tahun 2019-2023.
- 11) Dewan pengawas tidak terbatas pada aparat penegak hukum dan pengalaman minimal 15 tahun. Persyaratan

minimal adalah pendidikan S1 dan berasal dari unsur pemerintah serta masyarakat.

- 12) Pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang untuk menduduki jabatan publik sejak jangka waktu 5 tahun tanggal pengunduran diri.
- 13) Anggota pengganti jika terjadi kekosongan pimpinan KPK, dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR, sepanjang masih memenuhi persyaratan, melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan.
- 14) Menghilangkan ketentuan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum.

b. Penanganan Kasus Oleh KPK

- 1) KPK hanya berwenang menangani perkara korupsi dalam dua hal, yakni perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara minimal Rp 1 milyar.
- 2) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
- 3) KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan

penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

- 4) Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
- 5) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 6) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

c. Tugas dan Kewenangan KPK

- 1) Penambahan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penegasan kewajiban KPK membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 (satu) tahun kepada , DPR, dan BPK.

- 3) Penambahan pelaksanaan tugas supervisi ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
- 4) Penambahan kewajiban KPK dalam menyusun kode etik pimpinan dan pegawai KPK

Perubahan Undang-Undang ini diharapkan agar KPK mampu melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Namun pada faktanya KPK tidak mengimplementasikan apa yang diamanatkan oleh UNCAC tersebut. Padahal apabila KPK menerapkan anjuran UNCAC, KPK dapat mengendalikan dan mencegah korupsi dengan maksimal. Dari tiga kategori berupa status dan kedudukan organisasi KPK, penanganan kasus, serta tugas dan kewenangan, KPK belum menerapkan jenis-jenis korupsi yang diatur oleh UNCAC berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi antara KPK dan *ICAC* menggunakan model strategi yang sama yaitu dalam mengatasi korupsi (penindakan/operation, detektif/represif, pencegahan/preventif). KPK menggunakan strategi Preventif, Detektif dan Represif. Sedangkan *ICAC* menggunakan strategi *Prevention, Investigation, dan education*. Akan tetapi, pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi antara KPK dan *ICAC* berbeda, terlihat dari struktur organisasinya. KPK mempunyai 5 deputi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sedangkan *ICAC* hanya memiliki 3 deputi.
2. Persamaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong adalah mempunyai tujuan dan strategi pencegahan dan pemberantasan yang sama sedangkan perbedaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong terletak pada pelaksanaannya dimana pencegahan yang dilakukan KPK yaitu dengan pendekatan pendidikan dengan memasukan antikorupsi sebagai kurikulum. Sedangkan *ICAC* menggunakan pendekatan hukum. Dalam

pemberantasan, KPK boleh melakukan penuntutan tetapi *ICAC* tidak dapat melakukan penuntutan.

3. Pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didasari oleh tinjauan implementasi *UNCAC*. Indonesia perlu meningkatkan undang-undang antikorupsi dan mengadopsi 4 jenis korupsi sebagai tindak lanjut, yaitu perdagangan pengaruh (*trading in influence*), memperkaya diri secara ilegal (*illicit enrichment*), penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*), penyuapan asing (*foreign bribery*).

B. Saran

1. Peniruan model strategi tidak hanya secara sistematis, tetapi peniruan secara menyeluruh hingga kepada struktur organisasi dan tata cara pelaksanaan strategi. Struktur organisasi KPK terlalu gemuk jika dibandingkan dengan *ICAC*, sehingga berdampak pada pelaksanaan pemberantasan korupsi yang kurang efektif apabila dibandingkan dengan *ICAC*. Peniruan model dan tatacara pelaksanaan strategi secara menyeluruh diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas korup dan dapat menurunkan angka korupsi di Indonesia.
2. Pencegahan yang dilakukan KPK selain dengan pendekatan pendidikan yaitu memasukan antikorupsi sebagai kurikulum dan pendekatan

keagaaman, KPK diharapkan untuk menggunakan pendekatan hukum. Sehingga upaya pencegahan akan semakin berhasil dengan melihat pelaksanaan yang digunakan oleh negara yang berhasil menurunkan angka korupsi seperti yang digunakan oleh *ICAC*.

3. Diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar sesuai tinjauan implementasi UNCAC dibarengi dengan perubahan struktur organisasi KPK dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majestya, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Alamsyah, Wana, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020.

Anjarsari, Mega, *Studi Komparasi Hukum Pengaturan Asas Mekanisme Pengambil Alihan Perkara (Takeover Mechanism Principles) Dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dengan Hongkong Independent Commission Against Corruption*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. J.H.P. Bellefroid, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Dekker & Van de Vegt N.V., Nijmegen, 1950.

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: PT.Fikahati Aneska, 2009.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2000.

- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996.
- _____, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Awaliyah, Rizqi Nurul, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan China Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Azhar, Muhammad (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary With Pronunciations Sixth Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, 1999.
- Butarbutar, Elizabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Danil, H. Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Djaja, Ermansyah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2010.
- Farhan, Muhammad, *Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Independence Commission Against Corruption Hongkong*, Skripsi Sarjana Kriminologi, Jakarta:

- Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013.
- Fawa'id, Ahmad, Sultonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- Febari, Rizki, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong Dengan KPK Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Halimang, St., *Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ketiga, 2008.
- Heidenheimer, Arnold J. dan Michael Johnston, *Political Corruption: Concepts and Contexts*, New Jersey: Transaction Publisher, 2007.
- Kasiyanto, Agus, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Lopa, Baharudin, *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997.
- Lubis, Mochtar dan James S. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, Cetakan ke 3, 1995.
- Manion, Melanie, *Corruption By Design: Building Clean Government in Mainland China and HongKong*, Cambridge: Harvard University Press, 2004.

- Maramis, Frans, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Tigabelas, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Meryman, John Henry, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Second Edition, Standford: Standford University Press, 1985.
- Nasir, Ridlwan, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya : IAIN Press dan LKiS, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 tahun 1999), Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Ridho, Muhammad Syafiq, *Efektifitas Kinerja Pemberantasan Korupsi Dalam Bidang Penindakan, Persamaannya Adalah Membahas Tentang KPK (Latar Belakang Berdirinya, Tugas Dan Wewenang)*, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Schroder, Peter, *Strategi Politik*, Trans, Denice Joyce Matindas, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004.
- Shiu-Hing, Lo, *Anti-Corruption and Crime*, dalam The Other HongKong Report 1996, ed. Nyaw Mee-kau dan Li Si-ming, HongKong: Chinese HongKong University, 1996.

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 2008.

Swandari, Arin, Cisy Satwika, Lilyani Harsulistiyati, *KPK Berdiri Untuk Negeri*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019.

Wahyuningsih, Sri Endah, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Semarang: Unissula Press, Cetakan ke 2, 2013.

Jurnal

Abdurrachman Hamidah, Fajar Dian Aryani, Nayla Majesty, “The Study of Judges’ Disparity in Corruption Cases in Indonesia”, *Atlantis Press*, Volume 429, 2019.

Alkostar, Artidjo, Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, *Materi Seminar Pembaharuan UU KPK*, 2019.

Aryani, Fajar Dian, “Regulasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Sosiora*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Bolongaita, Emil. P., An Exception To The Rule? Why Indonesia’s Anti-Corruption Commission Secceds Where Other Don’t- A Comparison With The Philippines’s Ombudsman, *U4 Issue*, Nomor 4, 2010.

BPKP, Surat ditujukan kepada BPKP (att. Amien Sunaryadi), Nomor Ref. 298/0381 tentang Review of Indonesia Anti Corruption Strategy yang ditangani oleh Komisioner ICAC New South Wales, The Hon B S J O’Keefe AM QC.

Carolina, Anita, Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand, *Jurnal Infestasi*, Volume 8, Nomor 1, 2012.

Elda, Edita, Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Hariyani, Happy Febrina, Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik”, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, Volume 5, Nomor 2, 2016.

Joniarta, I Wayan, “Banalitas Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya)”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 2, Nomor 1, 2018.

KPK, Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Tahun 2020, *Bahan Siaran Pers*, 2020.

Kusumastuti, Cynthia Dewi, Ismunarno, “Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Recidive*, Volume 4, Nomor 3, 2015.

Lo, T.Wing dan Ricky C.C. Yu, Curbing Draconians Powers: The Effects On Hong Kong’s Graft-Fighter, *The International Journal of Human Rights*, Volume 4, Nomor 1.

Meagher, Paul, Anti Corruption Agencies: Rhetoric Versus Reality, *The Journal Of Policy Reform*, Volume 18, Nomor 1, 2005

Pohan, Sarmadan, “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia”, *Jurnal Justitia*, Volume 1, Nomor 01, 2018.

Skidmore, Max. J., promise and peril in combatting corruption: HongKong’s ICAC, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 547, 1996

TII e-newsletter_edisi_iii_Desember_2013.pdf

Transparency International, *Korupsi Dan Integritas Politik*, Jakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204.

Website

Gunawan, Arif, Revisi UU Bikin KPK Sekeren ICAC Hong Kong? Lha Serius?, Dikutip dari CNBC Indonesia, www.cnbcIndonesia.com, 2019, Diakses Pada 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

Berita KPK, Urgensi Pembaruan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, www.kpk.go.id., diakses tanggal 27 Maret 2021, Pukul 13.00 WIB.

Dikutip dari website [https:// www.kpk.go.id](https://www.kpk.go.id)., Inspektorat, diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 10.40 WIB

Dikutip dari website <https://www.icac.org.hk>., Advisory Committee on Corruption, diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB

Dikutip dari website <https://www.icac.org.hk>., Checks and Balances, Internal Monitoring, diakses pada 31 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB

Hukum Online, Belajar Dari Kegagalan TGPTPK, Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3295/belajar-dari-kegagalan-tgptpk/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul 12.00 WIB.

ICAC, Organisation Structure, diperoleh dari www.icac.org.hk, diakses tanggal 27 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

Ria Casmi Arrsa: Korupsi Cermin Kolonialisme, Kanker Demokrasi dan Optimisme Terhadap Pemberantasannya, www.legalitas.org., diakses tanggal 10 Maret 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Malik Mufty

NPM : 5117500070

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 Januari 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : JL. H. Abdul Ghoni Gg. Salak Pesurungan Kidul
Kota Tegal

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Ma- suk	Tahun Lulus
1.	SD Ihsaniyah GajahMada Kota Tegal	2003	2009
2.	SMP Negeri 7 Kota Tegal	2009	2012
3.	SMK Negeri 3 Kota Tegal	2012	2015
4.	S1 Fakultas Hukum Universitas Pan- casakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Hormat saya,

Abdul Malik Mufty